

LAPORAN PENELITIAN RISET STRATEGI PEMBIAYAAN BERBASIS PESANTREN 2021

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Area Survey:
Lombok Nusa
Tenggara Barat

LEAD SURVEYOR: RIDUAN MAS'UD
SURVEYOR: GATOT SUHIRMAN
VICI HANDALUSIA



**LAPORAN PENELITIAN
RISET STRATEGI PEMBIAYAAN BERBASIS PESANTREN 2021**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Grafik	iii
Daftar Tabel	iii
Pengantar	iv
PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Wilayah Lombok	1
1.2. Tujuan dan Maksud Survei	1
1.3. Ruang Lingkup Survei.....	2
1.4. Teknik Sampling & Cakupan Wilayah	2
1.5. Metode Survei	2
TINJUAN TEORITIS DAN EMPIRIS	4
2.1. Sejarah Singkat Pesantren di Lombok NTB	4
2.2. Tipologi Pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat	9
2.3. Peran Pesantren dalam Penguatan & Pengembangan Ekonomi	12
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
Deskriptif Statistik	14
3.1. Demografi Responden	14
1. Alamat Responden	14
2. Nama Pesantren dan Jumlah Responden	15
3. Jenis Pesantren	16
4. Sekolah Formal.....	17
3.2. Kondisi Usaha Responden	19
1. Kepemilikan Usaha Sekitar Pesantren.....	19
2. Keluarga yang Bermukim di Pondok Pesantren	19
3. Keluarga yang mengabdikan di Pesantren.....	20
4. Lama Usaha di Sekitar Pesantren	21
5. Alasan Berlokasi Usaha di Pesantren	22
6. Usaha UMKM	23
7. Sektor Usaha Unggulan.....	24
8. Kepuasan terhadap Hasil Usaha.....	25
9. Pengaruh Keberadaan Pesantren terhadap usaha UMKM	26
10. Pengaruh Kebutuhan Penduduk terhadap usaha UMKM	27
11. Tantangan dalam Pengembangan Usaha UMKM.....	28
12. Cara UMKM Menyelesaikan Tantangan.....	29

3.3. Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	31
1. Kebutuhan Pendampingan & Pelatihan UMKM/program inkubasi ...	31
2. Ketertarikan Pada UMKM Center	31
3. Manfaat Keberadaan UMKM Center	32
3.4. Kebutuhan Pembiayaan	33
1. Rencana Penambahan Modal Usaha	33
2. Jenis Pembiayaan yang Dibutuhkan	33
3. Limit Modal Kerja yang Dibutuhkan.....	34
4. Tujuan Tambahan Modal.....	35
5. Lembaga Keuangan sumber Modal.....	35
6. Ketertarikan mengajukan Pembiayaan Syariah	37
7. Manfaat Tambahan Pembiayaan bagi Penghasilan.....	37
8. Manfaat Pembiayaan bagi biaya Anak.....	38
9. Manfaat Pembiayaan di Luar kebutuhan.....	38
10. Membantu Pemerataan Kesejahteraan.....	39
11. Kemudahan yang Dikehendaki dari Pembiayaan.....	40
12. Kemudahan yang Dikehendaki dari Pembiayaan Syariah.....	41
3.5. Pengetahuan Tentang Bank Syariah	42
1. Pengetahuan tentang Bank Syariah	42
2. Hal yang Diketahui tentang Bank Syariah.....	43
3. Hal yang Terlintas tentang Bank Syariah	44
3.6. Masukan Umum	45
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi Strategi	48
Bibliografi	51

Daftar Grafik

Grafik 1. Alamat Respoden (Desa/Kelurahan/Kecamatan)	14
Grafik 2. Nama Pesantren dan Jumlah Responden	15
Grafik 3. Jenis Pesantren	16
Grafik 4. Kepemilikan Usaha di Sekitar Pesantren	19
Grafik 5. Keluarga Mukim di Pesantren	20
Grafik 6. Keluarga Mengabdi di Pesantren	20
Grafik 7. Lama saha di Sekitar Pesantren	21
Grafik 8. Alasan Berlokasi Usaha di Sekitar Pesantren	22
Grafik 9. Usaha UMKM	23
Grafik 10. Sektor Usaha Unggulan	24
Grafik 11. Kepuasan terhadap Hasil Usaha	25
Grafik 12. Pengaruh Pesantren terhadap Usaha UMKM	26
Grafik 13. Pengaruh Kebutuhan Penduduk terhadap Usaha	27
Grafik 14. Tantangan dalam Mengembangkan Usaha	28
Grafik 15. Kebutuhan terhadap Pendampingan Usaha	31
Grafik 16. Ketertarikan bergabung dengan UMKM Centre	31
Grafik 17. Manfaat UMKM Centre	32
Grafik 18. Rencana Menambah Modal	33
Grafik 19. Jenis Pembiayaan yang dibutuhkan UMKM	33
Grafik 20. Limit Modal Kerja yang Dibutuhkan	34
Grafik 21. Ketertarikan Mengajukan Pembiayaan	37
Grafik 22. Manfaat Tambahan pembiayaan bagi Penghasilan UMKM	37
Grafik 23. Manfaat pembiayaan syariah bagi Pendidikan Anak	38
Grafik 24. Manfaat Pembiayaan di Luar Kebutuhan	38
Grafik 25. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerataan Ekonomi	39
Grafik 26. Kemudahan Pembiayaan yang dikehendaki UMKM	40
Grafik 27. Kemudahan Pembiayaan Syariah yang dikehendaki UMKM	41
Grafik 28. Pengetahuan Responden tentang Bank Syariah	42
Grafik 29. Hal yang diketahui tentang Bank Syariah	43
Grafik 30. Hal yang terlintas tentang Bank Syariah	44

Daftar Tabel

Tabel 1. Kepemilikan Sekolah Formal	17
Tabel 2. Cara Menyelesaikan Tantangan Usaha	29
Tabel 3. Tujuan Tambahan Pembiayaan	35
Tabel 4. Lembaga Keuangan untuk Mendapatkan Modal	35

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah swt., penguasa alam semesta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Survei pembiayaan syariah berbasis komunitas pesantren Kawasan Lombok ini merupakan bagian dalam riset pengembangan dan perluasan cakupan pembiayaan bank Syariah, dalam konteks ini adalah pembiayaan berbasis pada komunitas pesantren.

Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penyelenggaraannya. Akomodasi, bantuan survei dan kerangka awal dari survei ini telah disusun oleh Tim riset BSI. Arah dan tujuan survei ini ingin menangkap secara utuh gambaran situasi dan kondisi terkini dari UMKM sekitar pesantren yang ada di Kawasan Lombok yang menjadi target dalam survei.

Harapan kami, tindak lanjut dari survei ini dapat diimplementasikan pada strategi penyaluran, pilot project hingga eksekusi pada level ultra mikro dan UMKM yang menjadi binaan pesantren.

Akhir kata, semoga Allah ta'ala berikan kemudahan, keberkahan dalam setiap aktifitas yang berdampak positif untuk ummat, terlebih membantu rekan-rekan masyarakat kecil di Indonesia.

Lombok, 13 Desember 2021

Tim Lombok

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Wilayah Lombok

Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di gugus kepulauan Nusa Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 5,2 juta jiwa (BPS NTB, 2021). Luas wilayah kurang lebih 2,0 juta hektar dimana 1,0 juta hektar berupa hutan. Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 8 kabupaten dengan 2 kota. Kabupaten yang ada di provinsi ini, antara lain Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Dompu, dan Sumbawa. Satu kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sumbawa Barat. Dua kota yang berada di NTB, yaitu Mataram yang merupakan ibu kota NTB dan Kota Bima.

Pulau Lombok luasnya sepertiga dari luas Pulau Sumbawa. Namun, penduduk Nusa Tenggara Barat yang berjumlah lebih dari tiga juta, dua pertiganya tinggal di Pulau Lombok. Hal ini terjadi karena Pulau Lombok lebih subur dari Pulau Sumbawa. Penduduk Pulau Lombok adalah orang Sasak. Mereka sebagian besar memeluk agama Islam. Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam "ekor" di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km², menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram.

1.2. Tujuan dan Maksud Survei

Survei ini memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ekosistem keuangan dan ekonomi pesantren di Wilayah Lombok beserta potensi dan tantangannya
- b. Pemetaan pesantren berdasarkan kewilayahan dan sektor ekonomi unggulan
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan lembaga keuangan dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan ekosistem pesantren

- d. Mengidentifikasi potensi dan tantangan pengembangan lembaga keuangan dan produk keuangan di sekitar pesantren sesuai dengan karakteristik pesantren terkait
- e. Merumuskan rekomendasi strategis dalam pengembangan lembaga keuangan untuk pesantren

1.3. Ruang Lingkup Survei

Adapun lingkup survey pada Wilayah Lombok ini adalah:

- a. Mengidentifikasi potensi ekonomi kewilayahan dan sektor unggulan yang terkait
- b. Mengidentifikasi kebutuhan layanan keuangan di sekitar pesantren
- c. Mengidentifikasi potensi dan tantangan pembiayaan berbasis pesantren
- d. Mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan berbasis komunitas pesantren
- e. Mengidentifikasi tantangan pembiayaan berbasis komunitas pesantren
- f. Menganalisa dampak pembiayaan terhadap kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut
- g. Mengusulkan model bisnis yang strategis dalam penerapannya di Bank Syariah Indonesia (BSI)
- h. Melakukan pemetaan daerah dengan replikasi daerah piloting

1.4. Teknik Sampling & Cakupan Wilayah

Teknik sampling yang digunakan dalam survei ini adalah *probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* dimana kriteria responden telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Responden yang tinggal di sekitar pesantren
- b. Responden memiliki atau berafiliasi pada UMKM di sekitar pesantren
- c. Cakupan responden survei ini adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Teknik pengambilan sampel dengan *snowball technic* yaitu dimana Ketika telah didapati satu responden maka menggelinging kepada responden lainnya.

1.5. Metode Survei

Suvei ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan secara utuh keadaan objek survei. Kemudian hasil

akan dipaparkan dalam grafik, gambar dan tabel untuk memudahkan dalam intrepertasi dari hasil.

TINJUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1. Sejarah Singkat Pesantren di Lombok NTB

Pondok pesantren, sebagaimana dipaparkan oleh Nurcholish Madjid, adalah lembaga yang bisa dikatakan sebagai wujud dari proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keis-laman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Sebab lembaga yang serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu dan Budha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia (Nurcholish Madjid, 1997).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan telah memberikan warna dan corak khas dalam masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan. Pesantren tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sejak berabad-abad. Oleh karena itu, secara kultural lembaga ini telah diterima dan telah ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kiai atau tuan guru dalam Bahasa Sasak Lombok, santri, serta seluruh perangkat fisik dari sebuah pesantren membentuk sebuah kultur yang bersifat keagamaan yang mengatur perilaku seseorang, pola hubungan dengan warga masyarakat. Dalam keadaan demikian, produk pesantren lebih berfungsi sebagai faktor integratif pada masyarakat dalam upaya menuju perkembangan pesantren (Zamakhsari Dhofier, 1994).

Pondok pesantren sekarang ini, tampaknya perlu dibaca sebagai warisan sekaligus sebagai kebudayaan “intelektual Nusantara.” Lebih dari itu, dalam sejumlah aspek tertentu, pesantren harus dipahami sebagai benteng pertahanan kebudayaan itu sendiri, karena peran sejarah yang dimainkannya. Harapan ini tentu saja tidak terlalu meleset dari konstruksi budaya yang digariskan oleh pendirinya. Selain diangan-angankan sebagai pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan yang berdimensi religius atau sekadar improvisasi lokal, pesantren juga dipersiapkan oleh para pendirinya sebagai motor transformasi bagi komunitas masyarakat dan bangsanya. Menariknya, angan-angan itu berangkat dari bandara tradisi masyarakat setempat. Dalam hal ini, dalam Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri (Abdurrahman Wahid, 1999). Pernyataan ini menunjukkan makna penting ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang integral. Sistem pendidikan pondok pesantren sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan oleh militer yakni bercirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini. Sebagai budaya pendidikan nasional, pondok pesantren digolongkan ke dalam sub kultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia (Abdurrahman Wahid, 1999).

Di pulau Lombok (1992), Nusa Tenggara Barat, pesantren sedikit banyak dipenga-ruhi oleh pesantren di Pulau Jawa. Dalam sejarahnya, perkembangan Islam di Lombok diperkirakan terjadi pada abad ke-16 M yang dibawa oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri, salah seorang dari Walisongo di Jawa (Solichin Salam, 1992). Sebelum Islam tiba di Lombok, penduduknya masih menganut paham animism (Harus Nasution, 1987). Pada awalnya, Islam masuk melalui adat Hindu yang dibawa oleh para wali dari Jawa dengan bahasa pe-ngantar bahasa Jawa kuno. Hal ini terlihat dalam kitab-kitab lontar dan silsilah raja-raja di Lombok yang ada hubungannya dengan penyebaran Agama Islam dari Jawa ke Indonesia bagian timur. Perkiraan tersebut juga didasari oleh pendapat yang mengatakan bahwa Agama Islam dibawa ke Lombok oleh Pangeran Sangepati (Harapandi, 1999).

Tentang asal-usul kehadiran pesantren di Lombok, dari mana dan siapa pendirinya, tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti (Litbang Depag, 1979). Tapi, dalam catatan Fahrurrozi Dahlan (2012), jika dilihat dari perkembangan-perkembangan pesantren, yang dalam istilah bahasa Lombok "*ngaji*" dan "*gerbung*", dapat ditelusuri dari para tokoh tuan guru Lombok yang pernah mengembangkan dakwah Islam. Pada akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M, muncul tokoh-tokoh ulama (tuan guru) di Lombok, seperti Tuan Guru H. Umar Kelayu di Lombok Timur. Setelah berkelana ke Mekkah selama 10 tahun, TGH Umar Kelayu kembali ke Lombok mengajarkan masalah-masalah akidah dengan sistem *ngamarin* dan *ngaji tokol*. *Ngamarin* adalah berjalan ke pelosok-pelosok kampung mengajarkan syahadat, rukun iman, ihsan, dan tata cara bersuci. Sementara *ngaji tokol* adalah memberi bimbingan agama di mana para muri du-duk bersila di hadapan tuan guru. *Ngaji tokol* ini biasa disebut oleh masyarakat Lombok dengan istilah *bekerbung*, *lalo mondok ngaji*. Masyarakat Lombok pada saat itu sangat menghormati dan menyegani para tuan guru di mana mereka mengaji. Para tuan guru melakukan metode dalam mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakatnya. Pada awal-awal abad ke 20 M, dapat disebut beberapa tuan guru, di antaranya adalah TGH. Musthafa Sekarbela Lombok Barat; TGH. Amin Sesela, TGH. Abdul Hamid Kediri Lombok Barat; TGH. Mas'ud Kopang Lombok Tengah; TGH. Ali Akbar Penen-dem Lombok Timur; TGH Ali Batu Sakra, TGH Tretetet, dan TGH Makmun Praya. Para tokoh tersebut sangat gigih mendak-wahkan Islam ke pelosok-pelosok kam pung dan mengadakan pengajian di ru-mah masing-masing. Biasanya di rumah tokoh-tokoh tersebut ada *beruga'* (lang-gar), *secepat* (langgar dengan tiang pe-nyangga empat), *sekenem* (langgar dengan tiang penyangga enam). Di tempat-tem-pat inilah para santri mengaji, mulai dari mengaji masalah agama dan lain-lain. Sistem pengajaran yang diterapkan para tuan guru tersebut masih sangat sederhana dan tradisional, mengingat kondisi masyarakat Lombok saat itu sangat terbelakang dan primitif. Sistem seperti itu yang kemudian dikenal di Jawa dengan sistem *sorogan*.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi sedikit perubahan sistem pengajaran pasca para tuan guru periode awal (1889-1912) dan pada periode 1920-1930 yang secara langsung dilanjutkan oleh para penerusnya, seperti TGH. Badarul Islam Pancor, Lombok Timur (putra TGH. Umar Kelayu), TGH. Rais (putra TGH. Musthafa) Sekarbela, TGH.

Saleh atau Tuan Guru Lopan, TGH. M. Saleh Hambali Bengkel Lombok Barat, dan TGH. Abdul Hafizd Sulaiman Kediri Lombok Barat. Perubahan signifikan pada periode ini adalah adanya sistem pengajian melalui *santrén* (musala) yang didirikan di dekat rumah tuan guru. Tapi materi pengajiannya tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang disampaikan oleh tuan guru terdahulu, yaitu hanya ada perluasan pembahasan terhadap materi-materi tauhid, usul fikih, dan mulai bersentuhan dengan pengajaran gramatikal bahasa Arab seperti nahwu dan Sharaf (Fahrurrozi Dahlan (2012).

Perkembangan pesantren mengalami perubahan sistem pada era 1930-an. Perubahan sistem pesantren mulai dirintis pertama kali oleh tokoh kharismatik TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid, yang mendirikan Pesantren Darul Mujahidin tahun 1934 M. Namun setelah pendudukan Jepang, pesantren tersebut dibubarkan oleh penjajah Jepang. Meski secara formal pesantren tersebut telah dibubarkan, tapi aplikasi dan penerapan pengajaran tetap dilaksanakan oleh TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid, sehingga selang beberapa tahun TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid berhasil mendirikan madrasah yang bernama Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M khusus untuk putra, dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1364 H bertepatan dengan 21 April 1943 M khusus untuk putri. Inilah madrasah pertama di daerah Lombok yang menggunakan pengajaran sistem klasikal.

Dua madrasah inilah embrio berdirinya organisasi masyarakat terbesar di NTB, yaitu Nahdlatul Wathan (NW) pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 M bertepatan dengan 1 Maret 1953 M. Organisasi ini memiliki cabang diseluruh daerah Lombok. Untuk menkoordinasi lembaga pendidikan di lingkungan organisasi ini, kemudian didirikanlah Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor (Fahrurrozi Dahlan, 2012).

Dari tahun ketahun TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid berperan penting dalam mencetak tokoh-tokoh pendiri pondok pesantren di Lombok NTB, sebagaimana terlihat dalam poin-poin berikut ini. Murid-murid beliau pada angkatan pertama dari NWDI tahun 1934-1938-an antara lain TGH. Mu'thi Musthafa, pendiri Pondok Pesantren al-Mujahidin Manben Lauqdi Lombok Timur, ustaz Mas'ud Kelayu, dan Abu Mu'minin. Pada angkatan kedua sekitar tahun 1939-1945-an yang terkenal antara lain TGH. Najamudin Ma'mun, pendiri Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya, Raden Tuan Sakra, pendiri Pondok Pesantren Nurul Islam Sakra, dan ustaz Yusi Muhsin. Pada angkatan ketiga sekitar tahun 1946-1949-an adalah TGH. Dahmuruddin, pengasuh Pondok Pesantren Darunnahdlatain Pancor dan TGH. Saleh Yahya. Kemudian pada angkatan berikutnya sekitar 1950-1955 adalah Syekh M. Adnan yang kini menjadi syekh di Madrasah al-Shaulatiyah di Mekah dan bermukim di sana, TGH. L.M. Faishal, pendiri Pondok Pesantren Manhal al-Ulum Praya, yang merupakan satu-satunya murid beliau yang diberi tugas dan amanat untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama (NU), sehingga dengan demikian NU masuk ke Lombok tidak terlepas dari peran TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid, dan TGH. Zainal

Abidin Ali, pendiri Pondok Pesantren Manbaul Bayan Sakra Lombok Timur.

Adapun murid-murid angkatan kelima sekitar tahun 1955-1960-an yang terkenal adalah TGH. Afifuddin Adnan, pendiri Pondok Pesantren al-Mukhtariyah Manben, TGH. M.Zainuddin Mansyur, MA, TGH. Zaini Pademare, TGH. Zainal Abidin Ali Sakra, pendiri Pondok Pesantren Manbaul Bayan Sakra, dan TGH. A.Syakaki, pendiri Pondok Pesantren Islahul Mukminin Kapek Pemenang. Sedangkan pada angkatan keenam sekitar tahun 1960-65-an yang terkenal adalah TGH. L. M. Yusuf Hasyim, Lc., pendiri Pondok Pesantren Dar al-Nahdhoh NW Korleko Lombok Timur, TGH. A.Syakaki, pendiri Pondok Pesantren Islahul Mu'minin Kapek Lombok Barat, TGH. M.Salehuddin Ahmad, pendiri Pondok Pesantren Darusshalihin NW di Kalijaga, TGH. Ahmad Muaz, pendiri Pondok Pesantren Nurul Yakin di Praya, TGH. Juaini Mukhtar, pendiri Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Narmada, TGH. Musthafa Umar, pendiri Pondok Pesantren al-Aziziyah Kapek Pemenang, dan lain-lain.

Peningkatan pengembangan pondok pesantren banyak yang lahir dari angkatan terakhir periodisasi pengkaderan TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid. Kader-kader ini juga dijadikan sebagai asisten beliau dalam banyak kegiatan keagamaan, sekaligus sebagai penerus pasca meninggalnya Syekh Zaenuddin pada tahun 1997 antara lain, TGH. Mustamiudin, pendiri Pondok Pesantren Suralaga, TGH. Habib Thanthawi, pendiri Pondok Pesantren Dar al-Habibi NW Bunut Baik Praya, TGH. Mahmud Yasin, pendiri Pondok Pesantren Islahul Ummah NW Lendang Kekah Mantang, TGH. M.Ruslan Zain An Nahdli, pendiri Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang, Lombok Timur, TGH. M. Zahid Syarif pendiri Pondok Pesantren Hikmatussyarif NW Salut Narmada, TGH. Tajuddin Ahmad, pendiri Pondok Pesantren Darunnajihin Bageknyale Rensing, TGH. L. Anas Hasyri pendiri Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Raja' Rensing, TGH. M. Yusuf Ma'mun pendiri Pondok Pesantren Birrul Walidain, TGH. M. Helmi Najamuddin, pendiri Pondok Pesantren Raudlatutthalibin Pao' Motong Masbagik, TGH. Khaeruddin Ahmad, Lc., pendiri Pondok Pesantren Unwanul Falah Pao' Lombok, dan ratusan pondok pesantren yang tersebar di pulau Lombok didirikan oleh alumni Pondok Pesantren Darun Nahdlathain NW Pancor di bawah bimbingan TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid (w.1997 M) dalam usia 102 tahun dalam hitungan Hijriah dan 98 tahun dalam hitungan Masehi (Fahrurrozi Dahlan, 2012).

Rintisan TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid dengan orientasi baru, muncul TGH. Musthafa Khalidi dan TGH. Ibrahim Khalidi, dua bersaudara mendirikan Pondok Pesantren Al-Islahuddiny Kediri Lombok Barat sekitar Tahun 1940-an. Pesantren inilah yang kemudian mengembangkan sistem kepesantrenan ke arah yang tradisional menuju sistem klasikal, seperti yang pertama kali dirintis oleh TGH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid Pancor Lombok Timur. Pondok pesantren ini merupakan pesantren pertama yang mengadopsi sistem klasikal dalam pengajarannya di kawasan Lombok Barat, baru disusul oleh pesantren-pesantren berikutnya, seperti Nurul Hakim Kediri, dan lain-lain (Fahrurrozi Dahlan, 2012).

Pada tahun berikutnya para tokoh tuan guru di masing-masing daerah termotivasi untuk mendirikan madrasah sistem klasikal, dapat dilihat dari periodisasi tuan guru yang semasa dengan TGKH. Muhammad Zaenuddin seperti TGH. Ibrahim mendirikan Pondok Pesantren Islahuddin Kediri, TGH. Abdul Karim mendirikan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, TGH. L. Abd Hafiz mendirikan pondok pesantren Selaparang, Kediri, TGH. Ibrahim Lomban Lombok Tengah, TGH. Moh. Mutawalli, Jerowaru Lombok Timur mendirikan Pondok Pesantren Darul Yatama wal Masakin. Peran tuan guru-tuan guru ini mencerminkan perubahan sistem pendidikan pesantren, yang masih bersifat sangat tradisional¹ berubah menjadi sistem pendidikan yang klasikal. Meskipun pada perkembangan awal pondok pesantren yang memakai sistem pendidikan klasikal tersebut jauh dari sempurna.

Pada awal tahun 1970-an pondok pesantren di Lombok NTB mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Segi kuantitas maksudnya bertambah banyaknya pondok pesantren. Pondok pesantren yang dirintis dan dibangun oleh para penerus tokoh-tokoh tuan guru periode awal dan kedua, seperti Pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah didirikan oleh TGH. Najmuddin Ma'mun, Manhalul Ulum Praya didirikan oleh TGH. L. M. Faishal, Manbaul Bayan Sakra Lombok Timur didirikan oleh TGH. Zaenal Abidin Ali. Semua pondok pesantren yang ada di Lombok merupakan hasil didikan para tokoh tuan guru periode awal dan kedua. Adapun segi kualitas dapat dilihat dari segi pengembangan pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah), tingkat menengah (MTs), dan tingkat Aliyah (Aliyah/SMU). Bahkan ada yang mengelola perguruan tinggi, dan rata-rata semua pondok pesantren mengelola jenjang pendidikan formal disamping informal. Sedangkan pondok pesantren yang mengelola pendidikan jenjang perguruan tinggi seperti Pondok Pesantren Darunnahdatain Pancor mengelola IAIH NW Lombok Timur, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani mengelola IAIH NW Lombok Timur, Universitas NW Mataram, dan Pondok Pesantren Nurul Hakim mengelola Universitas Tuan Guru Abdul Karim (UNTAK) Kediri dari tingkat Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal sampai Perguruan Tinggi. Pondok Pesantren Nurul Hakim letaknya di sebelah barat desa di jalan utama menuju Labuhan Lembar bila datang dari arah antara atau Cakranegara. Secara terperinci lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan di pondok ini adalah: Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal yang berdiri tanggal 5 Oktober 1988, Madrasah Ibtidaiyah berdiri tanggal 3 Oktober 1979, dan Madrasah Tsanawiyah putra dan putri berdiri tahun 1972. Di Madrasah Tsanawiyah ini yang statusnya "disahkan" menggunakan pendidikan *al-kutub al-mu'tabarah* standar pada mazhab Syafi'i dan pendidikan Bahasa Arab dan Inggris dengan mengikuti metode yang dikembangkan di Pondok Modern Gontor dan pengembangan Bahasa Arab LIPIA di Jakarta.

Selain memiliki TK dan MTs, Pondok Pesantren Nurul Hakim juga memiliki Madrasah Aliyah putra dan putri yang didirikan 1977 dengan status "disahkan". Madrasah ini termasuk berprestasi, karena banyak

siswa atau santrinya memiliki kegiatan yang berprestasi di tingkat daerah dan nasional. Selain alumninya melanjutkan ke STAIN Mataram (IAIN Mataram) atau di luar daerah, banyak juga yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum dan Swasta baik di NTB atau pun di luar NTB. Sejak tahun 1994 alumni Madrasah Aliyah putra telah dapat melanjutkan belajar di Fakultas Syari'ah dan Hadist Jami'ah Islamiyah Madinah dan Al-Azhar Mesir. Selain mengembangkan ilmu keagamaan, di madrasah ini memiliki beberapa jurusan seperti IPA, IPS, Bahasa, dan mengembangkan program keterampilan yang terdiri dari tiga jurusan, yaitu jahit-menjahit, pertanian terpadu, dan elektro.

Untuk tingkat perguruan tinggi, Pondok Pesantren Nurul Hakim sudah memiliki Ma'had Ali Darul Hikmah dan sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tuan Guru Haji Abdul Karim, yang sekarang telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Nurul Hakim. Para mahasiswanya banyak berasal dari santri atau siswa yang ada di Pondok Pesantren Nurul Hakim sendiridan dari luar daerah, tapi terbesar berasal dari sekitar pulau Lombok. Saat diadakan penelitian, pondok pesantren ini memiliki santri dan santriwati berjumlah 2.635 orang, dengan diasuh oleh 257 orang guru (TGH. Muzakkar Idris, 2012).

Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar yang terletak disebelah utara Desa Kediri merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki kekhususan dengan terdapat padanya bagian/program Tahfidz al-Qur'an, selain pendidikan formal dari tingkat Ibtidaiyah sampai tingkat Aliyah. Pimpinannya adalah seorang hafiz al-Qur'an, yaitu TGH. Khuwalid Yusuf Abdus Sattar. Orang tuanya sendiri yaitu TGH. Yusuf Abdus Sattar juga seorang hafiz. Jumlah santrinya saat ini sebanyak 750 orang dengan pengasuh (guru) sebanyak 63 orang.

Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu mengelola STKIP Qomarul Huda, STIKES Qomarul Huda, IAI Qomarul Huda, dan lain-lain (Mardin Abdul Malik, 2013). Pengembangan seperti ini menandakan adanya perubahan sistem pesantren yang dulunya masih mengenal istilah *Gerbung* dan *Ngaji Tokol*, berubah menjadi pesantren formal sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap melestarikan tradisi-tradisi yang baik dan relevan.

2.2. Tipologi Pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat

Mengidentifikasi perkembangan tipologi pondok pesantren yang jumlahnya ratusan dan tersebar luas hampir di setiap pelosok daerah Nusa Tenggara Barat merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dalam pola yang lamapun terdapat berbagai macam tipologi, seperti sistem *Gerbung*, sistem *Ngabdi*, sistem *Langgar*, dan lain-lain. Sistem ini berbeda karena perbedaan sistem kemasyarakatan daerah masing-masing. Begitu juga ada yang dapat dikategorikan pesantren tarekat. Ada pula pesantren yang terkenal dengan pengajaran nahu dan saraf atau mengutamakan pendalaman fikih, tasawuf, dan lain-lain. Dengan demikian pada dasarnya tipologi pondok pesantren di NTB sangat dipengaruhi oleh tipologi pemimpin-pemimpinnya (tuan guru), para pendukungnya, maupun sistem kemasyarakatan di sekeliling pondok pesantren tersebut

(Fahrurrozi Dahlan, 2012). Tipologi pondok pesantren mau tidak mau harus selaras dengan tipologi para pemimpin dan pendukungnya. Demikian pula kecenderungan perkembangannya. Dulu sewaktu para pemimpin dan pendukungnya relatif lebih homogen, pondok pesantren boleh dikatakan hanya mempunyai satu tipe, tidak banyak memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan selain karena tuntutan masyarakat terhadap isi pendidikan dalam lingkungan pesantren tidak banyak dan masih sangat sederhana, juga disebabkan karena pemimpin yang hampir sama.

Kini masyarakat pendukung pondok pesantren sudah banyak berubah, sehingga banyak memiliki tuntutan terhadap isi pendidikan pesantren yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan kelompok-kelompok yang semakin beranekaragam aspirasi dan tuntutannya. Di samping itu, aspirasi dan latar belakang pendidikan dan sosial para pemimpin pesantren yang dikembangkannya juga semakin berwarna-warni.

Tumbuhnya berbagai tipologi pondok pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat pada dewasa ini merupakan manifestasi dari vitalitas lembaga untuk tetap berkembang di tengah masyarakat dan bangsa yang sedang mengalami perubahan luar biasa. Namun demikian, itu tidak berlaku bagi semua tipe pendidikan pesantren, karena masing-masing mengikuti kecenderungan yang berbeda-beda.

Secara garis besar, lembaga-lembaga pesantren di Lombok, NTB dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar (Maksum, 1999):

1. Pesantren *Salafi*, yang tetap mempertahankan pengajian kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan pesantren/sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.
2. Pesantren *Khalafi*, yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren.

Dari kacamata teoretis tentang perubahan sosial, perkembangan ke dalam dua tipe kecenderungan tersebut menarik untuk diamati. Sebab hal ini akan memengaruhi keseluruhan sistem tradisi pesantren, baik sistem kemasyarakatan, agama, dan pandangan hidup, baik yang bersifat *microcosmos* maupun *macrocosmos* (A. Malik Fadjar, 1999). Homogenitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun, sesuai dengan keanekaragaman dan kompleksitas perkembangan masyarakat modern. Tentu saja tidak semua pesantren telah mengalami perubahan yang sama. Dalam tradisi pesantren, kini telah terdapat pemisahan antara pesantren-pesantren yang mengajarkan pengetahuan umum dan yang tidak atau belum. Walaupun pemisahan ini belum menimbulkan pengelompokan atas dasar sosial keagamaan yang berbeda dan masih sama-sama terikat sebagai penganut Suni, namun pemisahan tersebut telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal dalam bentuk aktifitas sosial dan intelektual, cara-cara berpakaian, gaya hidup,

tingkah laku kemasyarakatan, dan aspirasi pekerjaan. Namun demikian, masih terlalu dini untuk mencoba memperkirakan arah masa depan, atau meremehkan perpisahan yang lebih fundamental yang mungkin akan terjadi.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tipologi dari kecenderungan perkembangan pesantren ke dalam tipe *salafi* dan *khalafi* tidaklah bersifat dikotomis, dalam pengertian bahwa antara keduanya tidak terjadi loncatan-loncatan di mana santri dari tipe pesantren *salafi* yang telah menamatkan pelajarannya kemudian mengajar atau *nyantri* di pesantren *khalafi*. Sebaliknya para santri pesantren *khalafi* yang memerlukan pendalaman dalam pengajian kitab-kitab seringkali menetap di pesantren *salafi* dalam waktu yang cukup lama (Yasmadi, 2002).

Hal yang cukup menarik perhatian ialah adanya tipe pesantren *salafi* yang membuka cabang-cabang pengajaran keilmuan material-profesional, tapi tempat pengajaran tersebut didirikan di luar kompleks pesantren, atau karena kelompok pondok tersebut berada di wilayah pinggiran perkotaan yang tersedia fasilitas pendidikan formal dan modern yang cukup luas, para santri dipersilahkan atau dianjurkan untuk merangkap belajar pada sekolah-sekolah formal dan modern yang cukup luas, para santri dipersilahkan atau dianjurkan untuk merangkap belajar pada sekolah-sekolah formal, sedang di dalam lingkungan pesantren para santrinya khusus belajar kitab-kitab Islam klasik.

Dalam proses perkembangan jangka panjang, tipe pesantren *salafi* akan semakin kurang jumlahnya, tapi perannya justru akan tetap menonjol, khususnya pada fokus pendalaman pengajaran kitab-kitab Islam klasik yang diikuti oleh sejumlah santri tertentu, yang justru akan menjadi investasi langka dan mahal dimana para lulusannya akan menjadi sumber pengetahuan Islam bagi kalangan intelektual di masa mendatang. Tentu saja ciri-cirinya akan berbeda dengan ciri yang dimilikinya sekarang. Tipe-tipe pesantren *takhashush* semacam ini tampaknya sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pesantren di Lombok NTB.

Dalam kelompok pesantren *khalafi* (modern) yang sekarang ini berkembang, dapat digolongkan ke dalam tiga tipe besar. *Pertama*, pesantren yang masih terbatas menambah pengajaran profesional dalam bentuk latihan keterampilan. Karena pendidikan keterampilan sudah merupakan bagian penting dalam keseluruhan tujuan pendidikan pesantren, maka pesantren ini dapat dikategorikan sebagai pesantren modern (*khalafi*).

Kedua, pesantren yang sudah mengembangkan lembaga-lembaga madrasah, di mana komponen pendidikan umum telah menjadi bagian penting dalam keseluruhan sistem pendidikan pesantren. Tujuan pengembangan madrasah ini masih terbatas pada kebutuhan agar para muridnya kelak dapat menentukan pilihan pengembangan karirnya secara lebih baik dalam kehidupan modern, tapi tetap diharapkan menjadi orang yang dapat mendalami dan penganjur Islam yang potensial.

Ketiga, pesantren yang telah mendirikan sekolah-sekolah umum. Tujuan yang hendak dicapai melalui program pengembangan sekolah umum ini tentunya sudah lebih luas daripada pesantren *khalafi* kelompok kedua, yaitu mempersiapkan anak didik yang kelak sanggup melanjutkan ke universitas umum dengan bobot keislaman yang cukup memadai, sehingga bila kelak menjadi sarjana, mereka akan menjadi sarjana muslim yang cukup kuat keislamannya.

Dari pemaparan di atas, pondok-pondok pesantren di NTB dapat disimpulkan dalam tipe-tipe yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam peraturan No. 3 tahun 1979 yang mengungkapkan tipe pondok pesantren (Departemen Agama, 2003).

- a. Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajarannya yang berlangsung secara tradisional (*wetonan* atau *sorogan*).
- b. Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran klasikal (*madrasati*) dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar (madrasah) atau sekolah umum dan kiai hanya merupakan pengurus dan pembina mental para santri tersebut.
- d. Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah itu madrasah.

2.3. Peran Pesantren dalam Penguatan & Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pesantren memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang berpotensi dalam penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Adanya potensi SDM ini seharusnya diperkuat dengan keahlian-keahlian seperti pertanian, cara berdagang, bengkel dan lain serta jiwa wirausaha (Ryandono, 2018). Beberapa pesantren di Indonesia dan khususnya di Lombok NTB sudah memiliki konsep ini, salah satunya adalah pesantren Nurul Haramain NW, Narmada, Lombok Barat. Pondok Pesantren Nurul Haramain NW memberikan beberapa pelatihan terkait produk agribisnis, seperti teknologi transportasi, travel, pertanian, pembibitan, budidaya, pemupukan, pengolahan sampah, sortasi, grading, pembungkusan, dan pelabelan, termasuk kepada para santrinya (Hasanain Juaini, 2016). Selain dengan santri, masyarakat di sekitar pesantren juga dilibatkan dalam pengembangan ekonomi. Model pemberdayaan ekonomi pesantren Nurul Haramain

NW bagi masyarakat dilakukan secara kemitraan dengan kelompok tani, dan DKM melalui sebuah lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

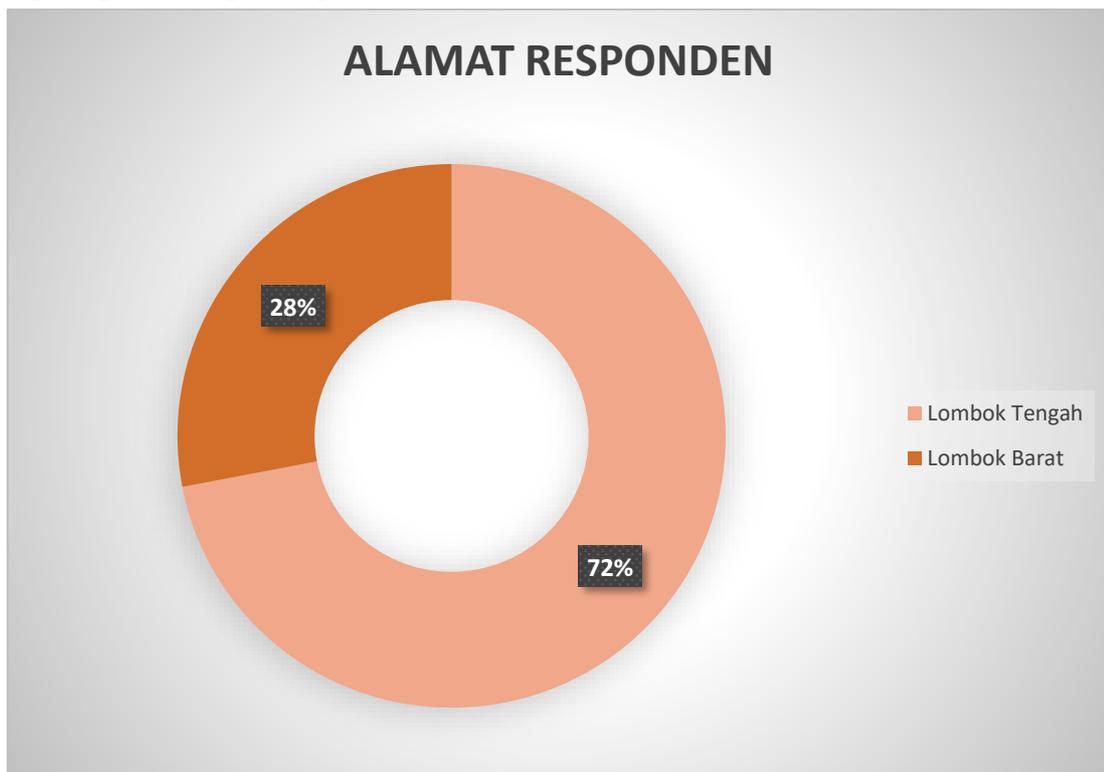
Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik digunakan untuk menangkap fenomena yang terjadi berbasis data yang terkumpul. Menurut Sekaran & Bougie, (2016) *descriptive statistic* merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan kondisi objek penelitian sehingga dapat tergambarkan dengan detail *general capture* yang akhirnya mampu untuk diambil rekomendasi ada Langkah-langkah yang selanjutnya.

3.1. Demografi Responden

1. Alamat Responden

Alamat responden penting untuk diungkap guna melihat sebaran dan cakupan dalam survei ini. Berikut adalah alamat para responden yang tergambar pada grafik 1:



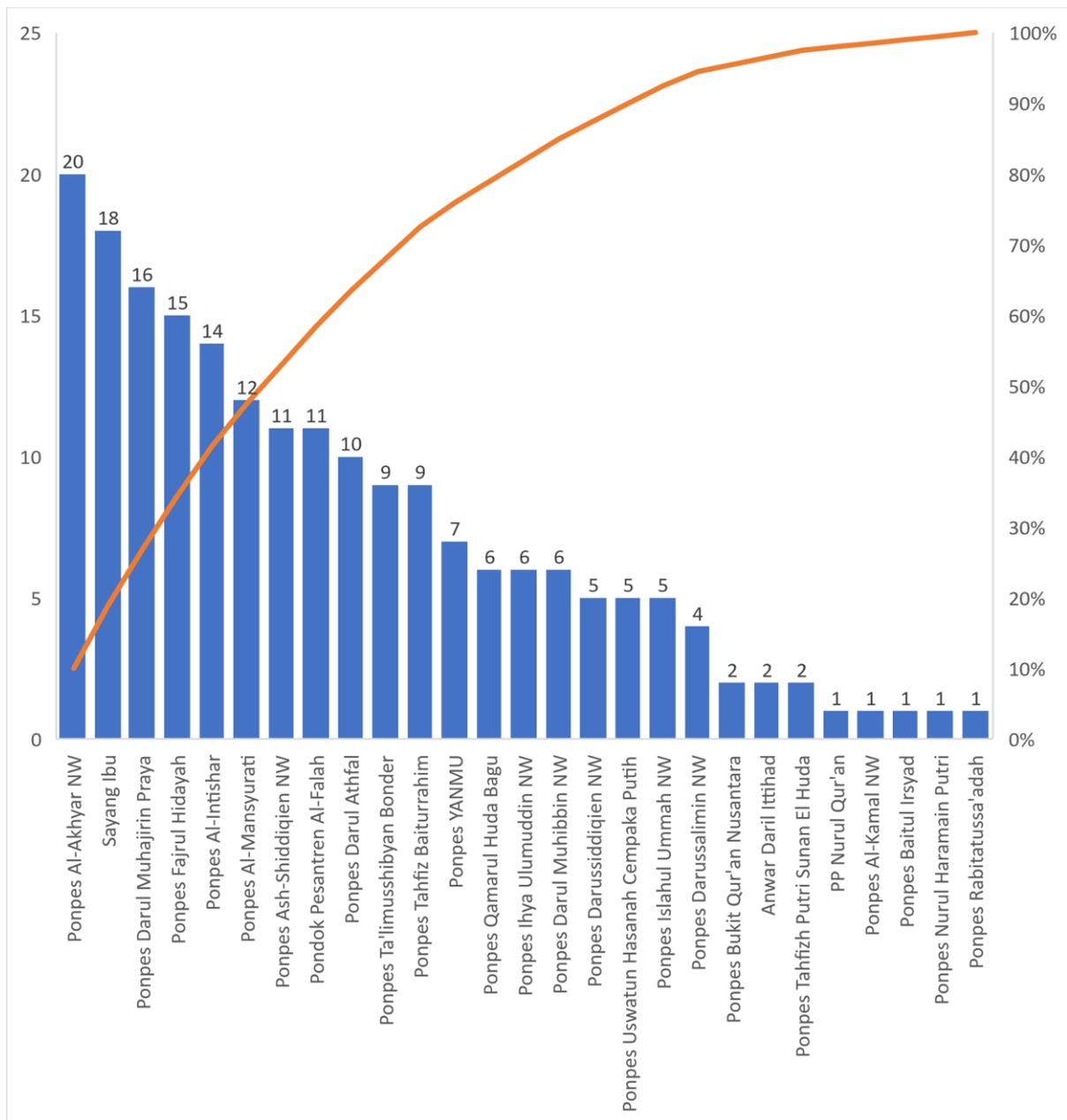
Grafik 1. Alamat Responden (Kabupaten)

Grafik 1 menggambarkan sebaran alamat responden wilayah Lombok yang mampu untuk menangkap keberagaman dari wilayah. Cakupan wilayah di 28 pondok pesantren sebagai titik survei dengan peringkat pertama adalah Kabupaten Lombok Tengah (72%) yang berlokasi dekat dengan KCP BSI Praya dan Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) Lombok Tengah.

2. Nama Pesantren dan Jumlah Responden

Sebaran pesantren dalam survei sudah dapat menjawab cakupan pada bab 1 yaitu terdapat 28 pondok pesantren yang telah dikunjungi untuk dijadikan target responden UMKM sekitarnya. Berikut pemaparan datanya:

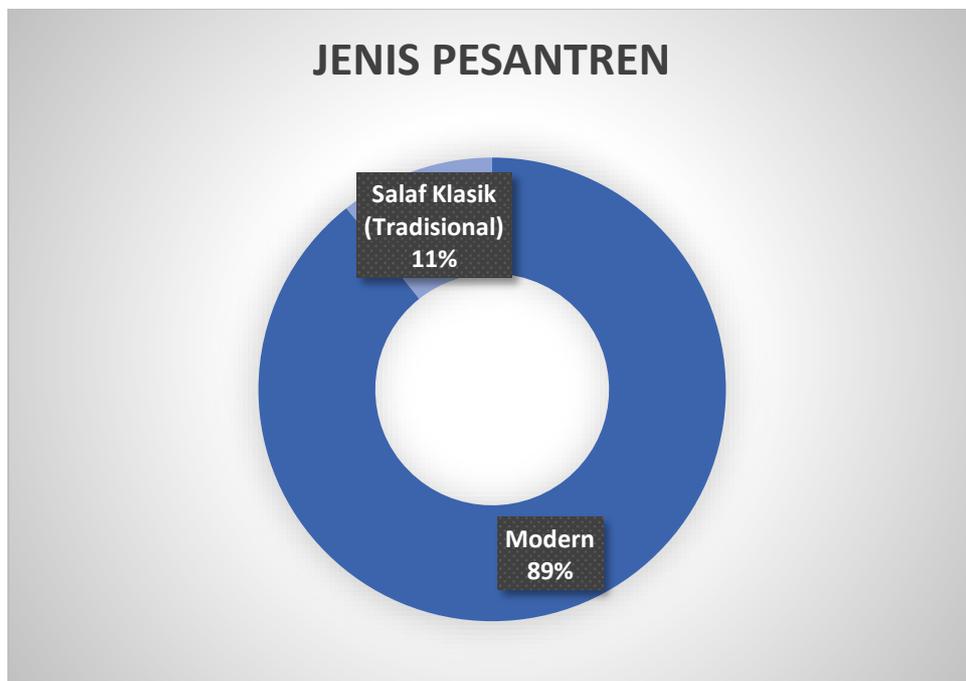
Grafik 2
Sebaran Jumlah responden tiap Pesantren



Grafik 2. Nama Pesantren dan Jumlah Responden

Sebaran pesantren lebih dari 28 pesantren yang dipuncaki Ponpes Al-Akhyar NW (20 responden) Kabupaten Lombok Barat. Beberapa UMKM sekitar memiliki kedekatan secara fisik dan emosional dengan ponpes ini. Dilanjutkan dengan Ponpes Sayang Ibu dengan 18 responden, Ponpes Darul Muhajirin Praya 16 responden, Ponpes Fajrul Hidayah 15 responden, Ponpes Al-Intishar 14 responden, Ponpes Al-Mansyurati 12, Ponpes Ash-Shiddiqien NW dan Ponpes Al-Falah masing-masing 11 responden, Ponpes Darul Athfal 10 responden, Ponpes Ta'limushshibyan Bonder 9 responden, Ponpes Tahfidz Baiturrahim 9 responden, Ponpes YANMU 7 responden, Ponpes Qamarul Huda Bagu 6 responden, Ponpes Ihya Ulumuddin NW 6 responden, Ponpes Darul Muhibbin 6 responden, Ponpes Darusshiddiqien 5 responden, Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Putih 5 responden, Ponpes Islahul Ummah 5 responden, Ponpes Darussalimin NW 4 responden, Ponpes Bukit Qur'an Nusantara 2 responden, Ponpes Daril Ittihad 2 responden, Ponpes Tahfidz Putri Sunan El-Huda 2 responden, Ponpes Nurul Qur'an 1 responden, Ponpes Al-Kamal 1 responden, Ponpes Baitul Irsyad 1, Ponpes Nurul Haramain Putri 1 responden, Ponpes Rabitatussa'adah 1 responden.

3. Jenis Pesantren



Grafik 3. Jenis Pesantren

Dari diagram di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 28 lokasi pesantren yang telah dipilih, sebanyak 25 pesantren atau sekitar 89% termasuk ke dalam pesantren modern dan sebanyak 3 pesantren atau sekitar 11% termasuk kedalam pesantren klasik (tradisional). Data lapangan juga menunjukkan 200 sampel UMKM yang terkumpul, sebanyak 20 UMKM tersebut berada di sekitar Pesantren Salaf Klasik (Tradisional) dan sebanyak 180 UMKM berada di sekitar Pesantren Modern.

4. Kepemilikan Sekolah Formal

Pada aspek demografi kepemilikan pesantren terhadap Lembaga sekolah formal, mayoritas pondok pesantren telah memiliki sekolah formal. Ini ditunjukkan oleh data 25 pondok pesantren yang terkategori modern telah memiliki sekolah formal. Pada ponpes modern, sudah dipastikan memiliki sekolah formal sebagaimana salah satu karakternya adalah menggunakan sistem kelas dan pengajaran berjenjang pada level yang telah ditetapkan masing-masing ponpes. Namun demikian, sebagaimana temuan data lapangan menunjukkan bahwa sebagian pondok pesantren modern yang telah memiliki sekolah formal, disamping memiliki kelas sekolah formal, ternyata juga tetap memberlakukan sekolah non formal seperti ngaji kitab kuning, sorogan dan program *takhassus*. Ini misalnya terjadi di Ponpes Darussalimin NW, Ponpes Darussiddiqien NW, Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Putih, Ponpes Ash-Shiddiqien NW dan Ponpes Ihya Ulumuddin NW. Sisanya, 3 pondok pesantren tidak memiliki sekolah formal, yaitu Ponpes Al-Akhyar NW, Ponpes Baitul Irsyad dan Pondok Pesantren Tahfidz Putri Sunan El-Huda.

Tabel 1
Kepemilikan Sekolah Formal

No	Nama Pondok Pesantren	Memiliki Sekolah Formal	Memiliki Sekolah Tidak Formal
1	Ponpes Darussalimin NW	✓	✓
2	Ponpes Darul Muhajirin Praya	✓	
3	Ponpes Al-Akhyar NW		✓
4	Ponpes Qamarul Huda Bagu	✓	
5	Ponpes Darussiddiqien NW	✓	✓
6	Ponpes Fajrul Hidayah	✓	

7	Ponpes Ta'limusshibyan Bonder	✓	
8	PP Nurul Qur'an	✓	
9	Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Putih	✓	✓
10	Ponpes Ash-Shiddiqien NW	✓	✓
11	Sayang Ibu	✓	
12	Ponpes Al-Kamal NW	✓	
13	Ponpes Baitul Irsyad		✓
14	Ponpes Bukit Qur'an Nusantara	✓	
15	Anwar Daril Ittihad	✓	
16	Ponpes Al-Intishar	✓	
17	Ponpes Ihya Ulumuddin NW	✓	✓
18	Pondok Pesantren Al-Falah	✓	
19	Ponpes Darul Athfal	✓	
20	Ponpes YANMU	✓	
21	Ponpes Islahul Ummah NW	✓	
22	Ponpes Al-Intishar	✓	
23	Ponpes Darul Muhibbin NW	✓	
24	Ponpes Nurul Haramain Putri	✓	
25	Ponpes Tahfiz Baiturrahim	✓	
26	Ponpes Tahfizh Putri Sunan El Huda		✓
27	Ponpes Al-Mansyurati	✓	
28	Ponpes Rabitatussa'adah	✓	

3.2. Kondisi Usaha Responden

1. Kepemilikan Usaha di Sekitar Pesantren



Grafik 4. Kepemilikan Usaha sekitar Pesantren

Dilihat dari diagram tentang kepemilikan usaha di sekitar pesantren, 87% responden mengaku memiliki usaha pribadi yang hingga kini digeluti. Usaha yang dimiliki saat ini merupakan usaha yang memang dibuka dengan modal dan kegigihan mereka, atau meminjam tambahan modal di bank. Sebagiannya lagi mengaku memiliki usaha karena merupakan warisan orangtua atau keluarga. Sisanya, 13 % responden yang disurvei mengaku tidak memiliki usaha di pesantren, dikarenakan mereka hanya karyawan atau pegawai tetap yang sudah lama bekerja disitu, seperti usaha fotocopy dan laundry.

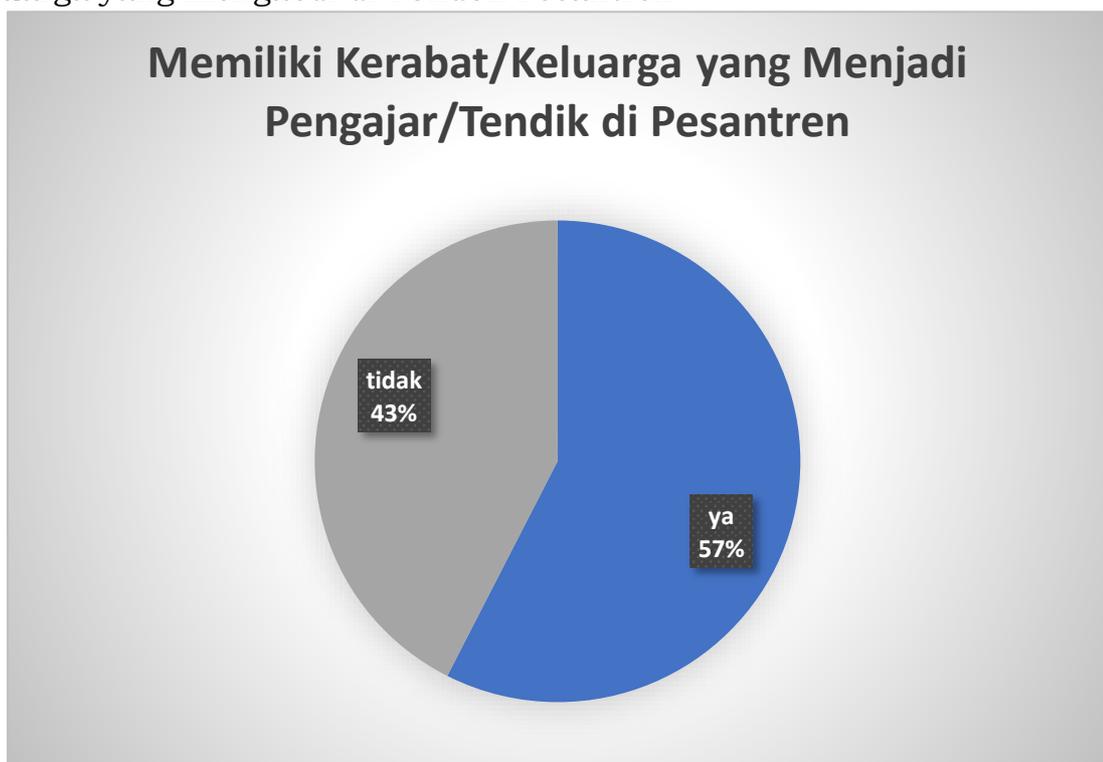
2. Keluarga yang Bermukim di Pondok Pesantren

Sebanyak 92% responden menjawab bahwa mereka memiliki keluarga yang bermukim di sekitar atau di dalam pondok pesantren. Sebagian besar mereka dan keluarga besar sudah menetap di lingkungan pesantren. Sebagian lagi, 8% responden atau UMKM yang disurvei mengaku tidak memiliki keluarga baik anak, saudara atau ponakan yang bermukim di pondok pesantren terdekat.



Grafik 5. Keluarga yang bermukim di pesantren

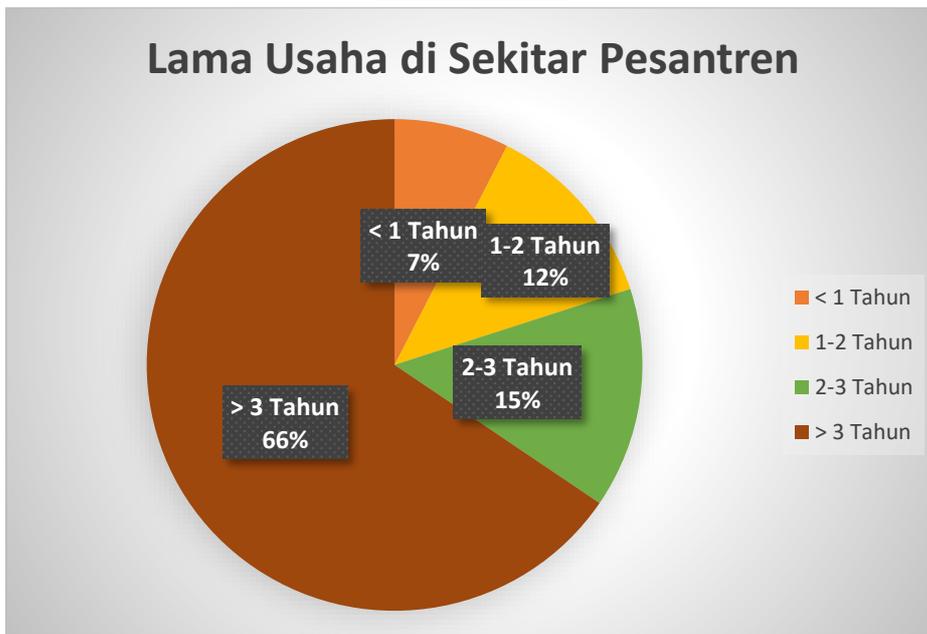
3. Keluarga yang mengabdikan di Pondok Pesantren



Grafik 6. Keluarga yang mengabdikan di pesantren

Sejumlah 57 % responden UMKM yang disurvei sebagian besar mengaku memiliki keluarga dan atau kerabat yang mengabdikan sebagai pengajar atau tenaga pendidik di pesantren. Sisanya 43 % tidak memiliki kerabat atau keluarga yang menjadi pengajar/tendik di pesantren.

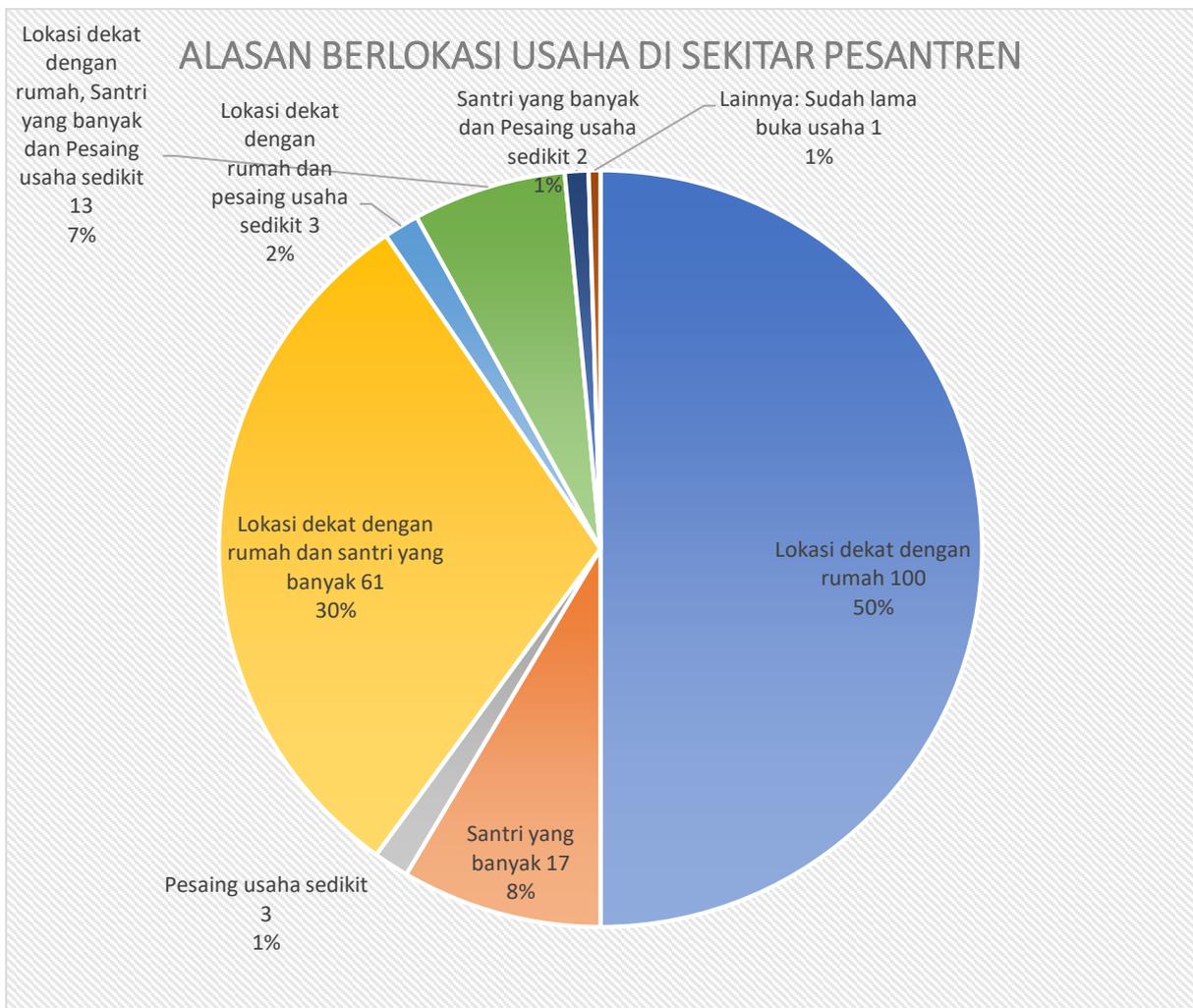
4. Lama Usaha



Grafik 7. Lama Usaha UMKM

Berdasarkan kategori lama usaha di sekitar pesantren, 7% responden memiliki usaha kurang dari setahun. 12 % UMKM telah memiliki usaha 1 sampai 2 tahun. Sementara itu, 15% responden telah membuka dan menggeluti usaha selama 2 sampai 3 tahun. Dan mayoritas responden sejumlah 66% mengaku telah memiliki usaha di sekitar pesantren lebih dari 3 tahun. Hal ini disebabkan karena UMKM memang merupakan masyarakat yang telah lama tinggal dan penduduk tetap sekitar pesantren yang menjadi lokasi survei.

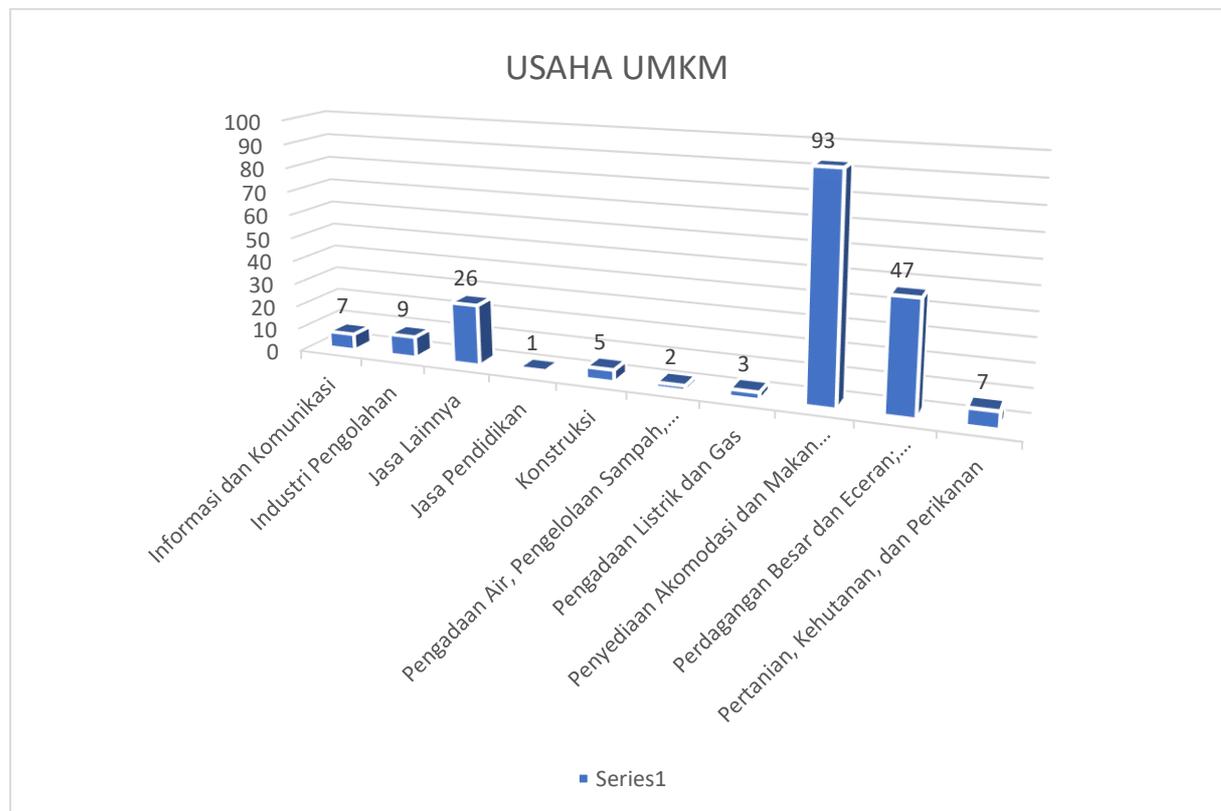
5. Alasan Berlokasi Usaha di Sekitar Pesantren



Grafik 8. Alasan Usaha Sekitar Pesantren

Dari data pada diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 100 responden (50%) UMKM tersebut berdiri karena lokasi yang dekat dengan rumah mereka. 61 responden (30%) mengaku mengatakan bahwa pengaruh lokasi usaha yang dekat dengan rumah mereka, disamping juga karena santri dari pondok pesantren terdekat yang lumayan banyak. Sisanya 17 responden (8%) mengaku membuka usaha di sekitar pesantren hanya karena santri yang banyak. Disusul 13 responden (7%) beralasan membuka usaha di sekitar pesantren karena lokasi yang dekat dengan rumah, santri yang banyak dan pesaing usaha yang sedikit. 3 responden (2%) mengaku karena lokasi yang dekat dengan rumah dan pesaing usaha yang sedikit. 3 responden (2%) beralasan karena pesaing usaha yang sedikit, dan hanya 1 orang responden (1%) menjawab lainnya, karena yang bersangkutan memang telah membuka usaha jauh sebelumnya di sekitar pesantren.

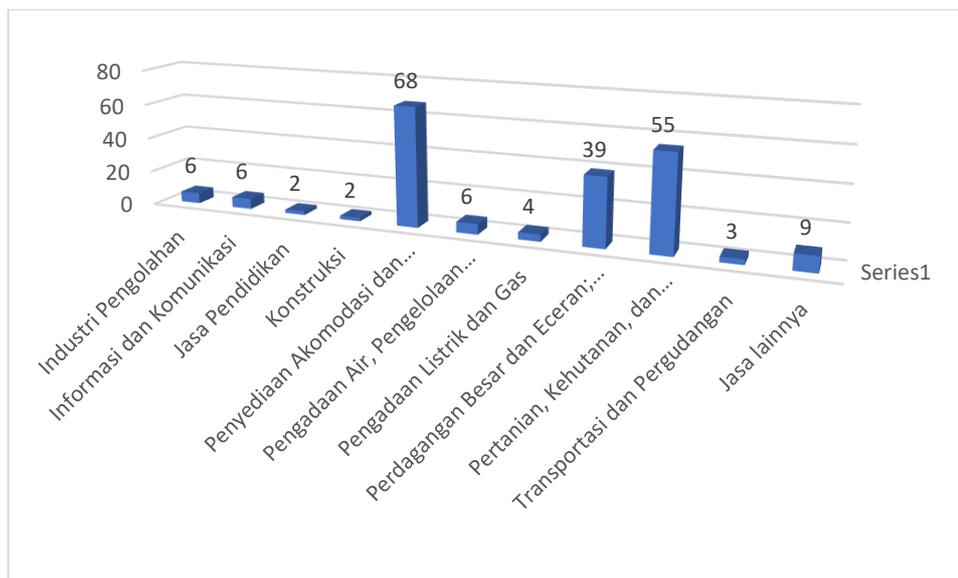
6. Usaha UMKM



Grafik 9. Usaha UMKM

Penyediaan akomodasi makan dan minum mendominasi usaha UMKM, yakni 93 responden merupakan UMKM yang menyediakan akomodasi makanan dan minuman yang digelutinya. Penyediaan akomodasi dan minum ini mencakup warung makan, warung nasi bungkus, sembako, sayur mayur, penjual gorengan dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis usaha terbanyak kedua yang digeluti oleh UMKM adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 43 responden. Usaha-usaha grosir, kios dan toko pakaian, bengkel motor dan mobil masuk kategori ini. 9 UMKM menggeluti usaha olahan makanan dan minuman tradisional dan semi modern seperti home industri sale pisang dan lain-lain. 7 UMKM bergerak di bidang informasi dan komunikasi seperti toko dan konter HP, pulsa dan listrik. Demikian pula halnya, 7 UMKM bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. 5 UMKM menggeluti usaha konstruksi seperti toko alat-alat bangunan, penjual kayu/meubel, peternak/jual beli ikan segar, dan lain-lain. 3 orang UMKM memiliki usaha di bidang pengadaan gas dan listrik, 2 UMKM di bidang pengadaan air dan pengolahan sampah, limbah dan daur ulang barang bekas, dan hanya 1 UMKM yang bergerak di bidang jasa Pendidikan. Sisanya, 26 UMKM masuk dalam kategori usaha lain-lain seperti salon, barbershop, dan lain-lain.

7. Sektor Usaha Unggulan



Grafik 10. Sektor Usaha Unggulan

Dari hasil tabulasi jenis UMKM yang paling banyak pada sampel di atas, yakni 68 UMKM adalah penyedia akomodasi makan dan minum. Hal ini tidaklah mengejutkan, sebab rata-rata pondok pesantren sekitar dan terdekat dengan usaha UMKM memiliki santri yang “bebas” mencari dan membeli kebutuhan makanannya selama jam sekolah secara mandiri. Artinya, santri dan para guru yang mengajar di pesantren tidak ditanggung atau disediakan oleh pihak pengelola pesantren sebagaimana halnya pondok pesantren yang sifatnya modern tapi tertutup dan mandiri dalam pengelolaannya, terutama dari segi ekonomi dimana makan minum dan asrama sudah ditanggung.

Selanjutnya urutan kedua terbanyak adalah Usaha UMKM di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Terdapat 55 responden menyatakan demikian. Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok masyarakat pesantren dan masyarakat umum adalah makanan dan minuman, sehingga kebutuhan akan barang-barang seperti beras, ikan dan sayur-mayur merupakan hal yang lumrah. Termasuk dalam kategori usaha unggulan jenis ini adalah bidang kehutanan/perkayuan yakni penjual kayu dan pengrajin kayu/meubel yang menyediakan keperluan sekolah madrasah pesantren sekaligus kebutuhan santri akan lemari dan rak buku.

39 responden mengungkapkan bahwa usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat ditawarkan. Industri pengolahan, industri informasi dan komunikasi dan pengadaan air dan pengolahan sampah serta daur ulang masing-masing 6 orang responden sepakat menjadikan bidang usaha tersebut sebagai usaha unggulan yang dapat dikembangkan. Sementara itu, bidang usaha Pengadaan listrik dan gas adalah sektor unggulan lainnya menurut 4 responden, bidang

transportasi dan pergudangan menurut 3 responden, bidang konstruksi 2 responden, dan bidang jasa Pendidikan 2 responden. Selebihnya, ada 9 responden yang menyatakan bidang usaha lain sebagai sector unggulan, seperti real peternakan ayam/kambing, salon, penjahit, dan lain-lain.

7. Kepuasan terhadap Pendapatan Hasil Usaha

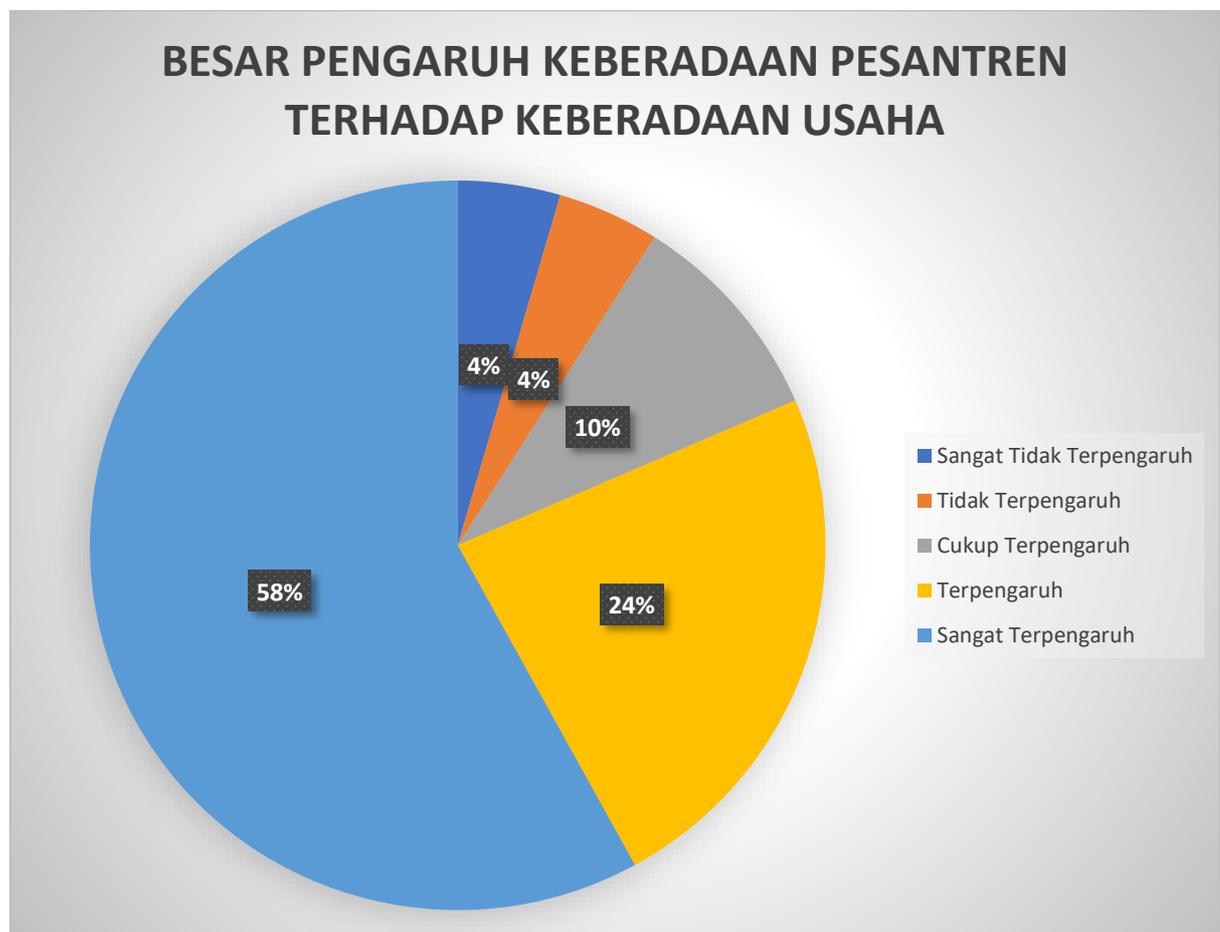


Grafik 11 Kepuasan terhadap Pendapatan Hasil Usaha

Dari hasil analisis diagram di atas didapatkan bahwa 55% UMKM (110 responden) pemilik UMKM di sekitar pesantren merasa tidak puas dengan pendapatan yang selama ini mereka dapatkan. Sisanya, 90 responden (45%) menyatakan puas dengan pendapatan yang mereka dapatkan dari usaha yang ditekuninya.

8. Pengaruh Pesantren terhadap Usaha UMKM

Pengaruh Pesantren terhadap Usaha UMKM

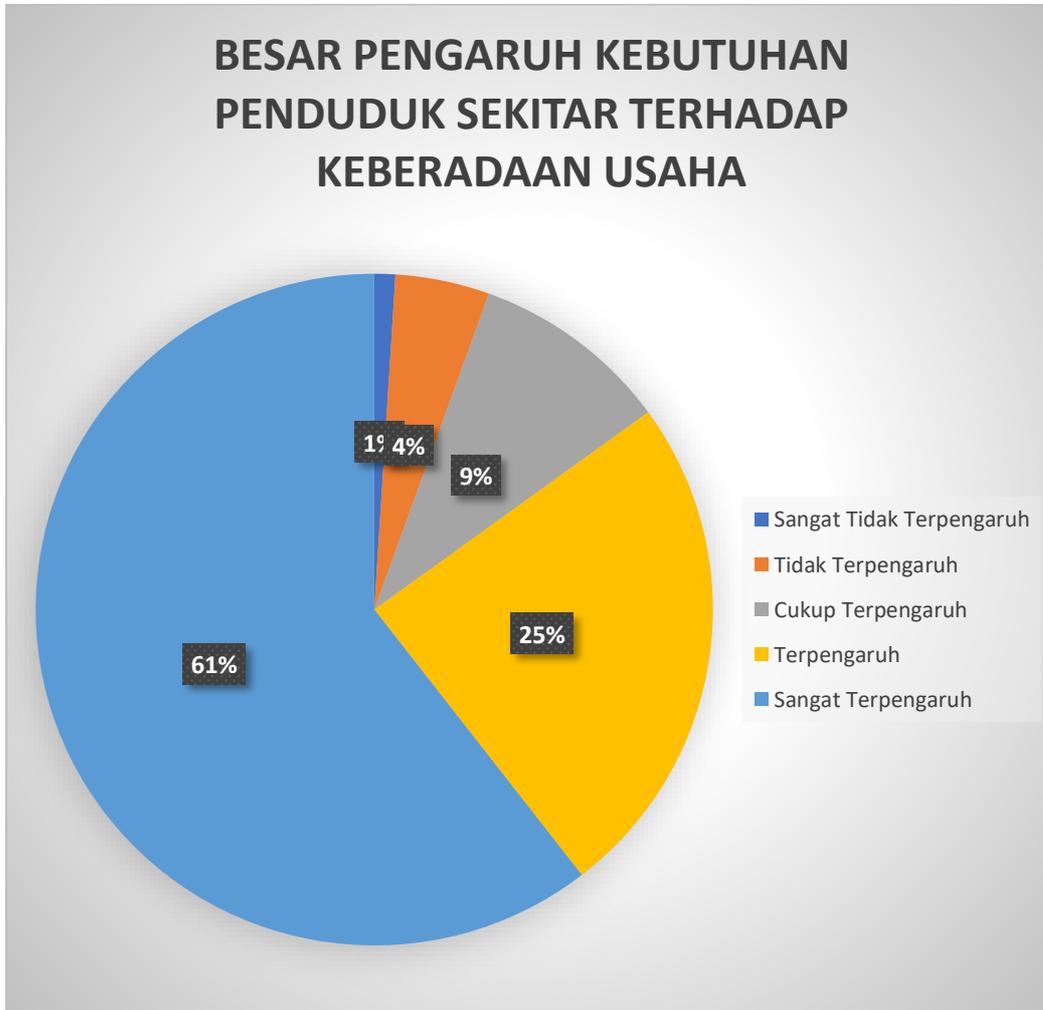


Grafik 12. Pengaruh Pesantren terhadap Usaha UMKM

Berdasarkan gambar di atas, maka sebanyak 58% responden memberikan jawaban bahwa pesantren sangat berpengaruh terhadap usaha mereka. Oleh karena itu, ketika Covid-19 melanda dan sekolah-sekolah, termasuk sekolah formal yang ada di pesantren diliburkan atau menerapkan system sekolah online, maka dapat dipastikan sector usaha UMKM sekitar pesantren lah yang pertama kali sangat terdampak. Sector UMKM yang sangat terpengaruh ini antara lain usaha fotocopy dan alat tulis kantor, warung makan, warung nasi bungkus, dan bengkel motor sederhana. Adapun selanjutnya sektor usaha warung sembako, sector usaha konter pulsa dan lain-lain terpengaruh juga, hanya saja tidak seperti usaha-usaha lain yang sangat terpengaruh dengan keberadaan aktifitas pesantren seperti penjual nasi bungkus, penjual bensin, bengkel dan tambal ban. Responden yang masuk kategori ini sejumlah 24%. Selanjutnya, usaha-usaha lain yang cukup terpengaruh seperti usaha meubel dan pengrajin kayu, pembuat meja, rak buku dan lemari santri yang ditunjukkan oleh jawaban responden sejumlah 10%. Sisanya usaha-usaha UMKM sekitar pesantren ada pula yang tidak terpengaruh atau sangat tidak terpengaruh yakni masing-masing sebesar 4% seperti jual beli dan reparasi mobil dan lain-lain karena skalanya yang tidak

memprioritaskan keberadaan santri dan aktifitas pesantren sebagai alasan an membuka usaha.

9. Pengaruh Kebutuhan Penduduk terhadap Usaha UMKM



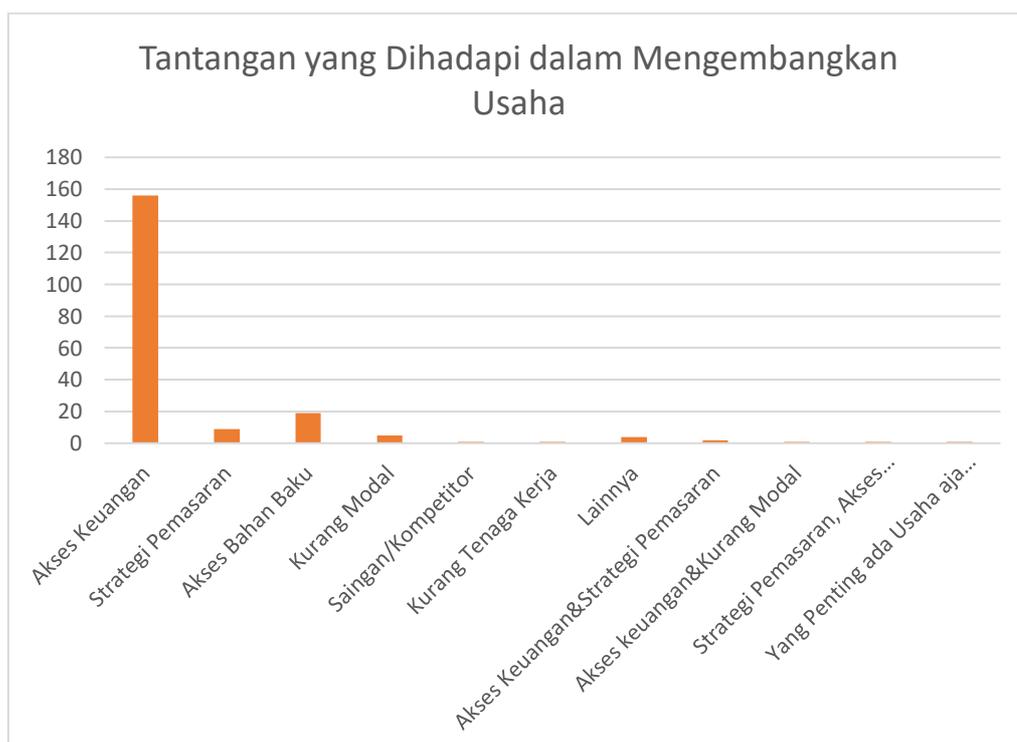
Grafik 13. Pengaruh Pesantren terhadap Usaha

Pengaruh keberadaan pesantren terhadap kebutuhan masyarakat umumnya didominasi oleh usaha-usaha warung sembako, dan jual beli pulsa sebagai usaha yang selain mengharapkan keberadaan pesantren sebagai segmen utamanya, masyarakat umum juga menjadi target mereka, yang ditunjukkan oleh jawaban responden sejumlah 61%. Disusul kemudian oleh responden yang menjawab kekebutuhan masyarakat biasa berpengaruh pada usaha mereka sebesar 25%. 9% responden menjawab bahwa kebutuhan masyarakat cukup mempengaruhi keberadaan usaha. Sisanya sebesar 4% tidak terpengaruh, dan 1% menyatakan bahwa kebutuhan penduduk sekitar sangat tidak berpengaruh terhadap usaha mereka.

Berdasarkan hasil deskripsi gambar tentang pengaruh pondok pesantren dan kebutuhan penduduk terhadap usaha responden di atas, didapatkan persentase dia atas 60% sampel pemilik UMKM di sekitar pesantren merasa keberadaan pesantren dan kebutuhan penduduk

sekitar sangat berpengaruh terhadap keberadaan usaha mereka. Hal ini berarti bahwa penduduk sekitar dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan keberadaan pondok. Hal ini mungkin dikarenakan banyak pesantren modern yang memilih untuk tertutup terhadap dunia luar pesantren, semua kebutuhan santri telah disediakan oleh pihak sekolah sehingga sangat sedikit terjadi interaksi antara santri dengan pemilik UMKM sekitar. Selain itu, ditemukan pula fakta di lapangan bahwa beberapa pondok pesantren modern yang bersifat eksklusif dan tertutup serta mengelola manajemen usaha pesantrennya secara mandiri tidak berpengaruh signifikan terhadap usaha UMKM sekita. Hal ini misalnya seperti yang terjadi pada UMKM sekitar pondok pesantren Nurul Haramain, baik putra maupun putri. Berbeda halnya jika pesantren bersifat terbuka, memberikan akses bagi UMKM sekitar untuk berjualan dan menjalankan usaha seperti membuat dan menyewakan kamar-kamar pondok kepada santri yang mondok di sekitar pesantren, maka keberadaan pesantren sangat berpengaruh terhadap usaha UMKM sekitar. Namun demikian, fakta ini tidak hanya ditemukan di pondok pesantren modern, pondok pesantren yang notabene merupakan pesantren salaf tradisional dan tidak memiliki sekolah formal seperti pesantren Tahfidz Sunan El-Huda di Mantang Lombok Tengah baik Putra dan Putri, hanya memiliki program mengaji kitab kuning dan memfokuskan diri pada program hafalan Al-Qur'an, juga bersifat tertutup dan mengelola pesantren secara mandiri. Keberadaan pesantren Sunan El-Huda tidak cukup berpengaruh bagi usaha-usaha UMKM sekitarnya, seperti usaha warung makan, fotocopy dan laundry.

10. Tantangan dalam Mengembangkan Usaha



Grafik 14. Tantangan dalam Mengembangkan Usaha

Dalam mengembangkan usahanya, sebagian besar UMKM, yakni menembus angka 158 responden sekitar pondok pesantren mengakui bahwa faktor akses keuangan adalah persoalan utama dalam mengembangkan usahanya. Sisanya, faktor—faktor akses bahan baku dan strategi pemasaran, serta kurang modal menjadi tantangan yang cukup menghambat perkembangan usaha mereka.

Selanjutnya, beberapa responden menyatakan bahwa dalam menyelesaikan tantangan pengembangan usaha yang ada, mereka mengandalkan bantuan modal dari kolega atau keluarga. Jumlah ini sedikit lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah responden yang menyatakan bahwa mereka mengajukan pembiayaan ke bank Syariah. Artinya, ada beberapa responden yang menyatakan diri sebagai nasabah bank Syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana mereka kebanyakan merupakan eks nasabah Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Namun demikian, sebagian besar responden mengajukan pinjaman di bank konvensional sebagai cara tercepat dalam menyelesaikan tantangan usaha, khususnya akses keuangan yang terbatas. Jumlah ini, ternyata jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa mereka adalah nasabah Lembaga keuangan informal seperti Bank Mekar atau yang lebih dikenal dengan “Bank Jongkok” atau “Bank Rontok”. Sebagian UMKM yang disurvei mengaku lebih banyak terjebak pada pinjaman Bank Mekar ini karena terpengaruh oleh syarat yang sangat mudah dimana hanya bermodalkan KTP dan Kartu Keluarga, dana langsung cair. Bank Mekar menjalankan usahanya dengan menysasar Usaha-usaha ultra mikro di masyarakat, khususnya yang ada di sekitar pesantren dengan sistem Tanggung Renteng dimana satu kelompok beranggotakan 10 anggota diketuai oleh satu orang sebagai petugas menagih angsuran berbunga yang sudah ditetapkan di awal setiap minggunya selama satu tahun atau lebih. Ketua yang diawasi dan ditugaskan oleh pegawai Bank Mekar biasanya menagih angsuran setiap pagi, siang atau sore setiap minggunya, bahkan sambal duduk berjongkok hingga Bank Mekar ini lebih dikenal dengan istilah Bank Jongkok.

11. Cara UMKM Menyelesaikan Tantangan Usaha

Tabel 2
Cara Menyelesaikan Tantangan Usaha

Cara Menyelesaikan tantangan Usaha	Jumlah
Meminta bantuan teman/keluarga:	61
- Meminta bantuan teman/keluarga, Bank Mekar	9
- Meminta bantuan teman/keluarga, Koperasi	1
- Meminta bantuan teman/keluarga, Mengajukan pembiayaan ke bank Syariah	4
- Meminta bantuan teman/keluarga, Mengajukan pinjaman pada bank konvensional	9

Mengajukan pembiayaan ke bank Syariah	32
Mengajukan pinjaman pada bank konvensional	49
- Mengajukan pinjaman pada bank konvensional, Bank Mekar	3
- Mengajukan pinjaman pada bank konvensional, Koperasi	1
Lain-lain	
- Modal Pribadi	9
- Pinjam di Bank Mekar	12
- Berjualan online	3
- Jual Aset (Hasil Kebun)	7
Total	200

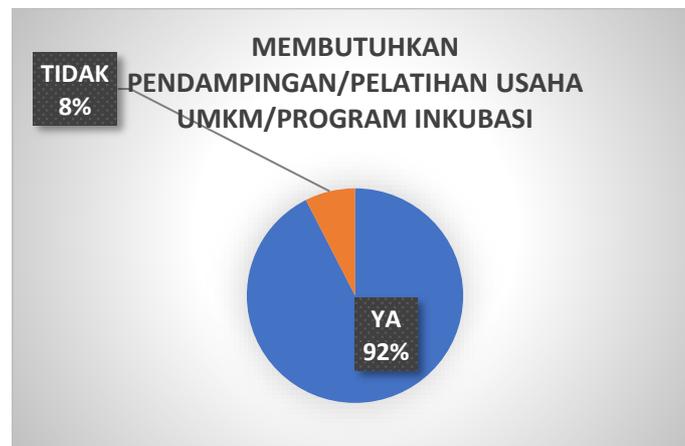
Dalam menyelesaikan setiap tantangan dalam usahanya, UMKM memakai beberapa cara yaitu antara lain: sebagian besar UMKM, yakni sebanyak 61 orang meminta bantuan modal kepada teman/keluarga. Akan tetapi, selain meminta bantuan teman/keluarga, beberapa UMKM misalnya sekaligus meminjam uang di Bank Mekar atau yang dikenal dengan Bank Jongkok sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. UMKM yang masuk kategori ini sejumlah 9 UMKM. Ada juga, 1 UMKM yang selain meminta bantuan teman/keluarga keluarga juga sekaligus meminjam modal usaha di koperasi. Sebagian lagi, sebanyak 4 orang UMKM disamping meminta bantuan keluarga/teman juga sekaligus mengajukan pinjaman ke bank Syariah. Sisanya, sebanyak 9 UMKM disamping meminta bantuan keluarga/teman juga sekaligus mengajukan pinjaman ke bank konvensional.

Selanjutnya, sebanyak 32 UMKM saja yang mengajukan pembiayaan ke bank Syariah *an sich*. Demikian juga, 49 UMKM mengajukan pinjaman ke bank konvensional *an sich* dalam mengatasi tantangan usahanya. Akan tetapi, ada juga 3 UMKM yang disamping mengajukan pinjaman ke bank konvensional juga sekaligus meminjam dana modal usaha ke Bank Mekar. Dan, ada 1 UMKM yang disamping mengajukan pinjaman ke bank konvensional juga ternyata sekaligus meminjam dana modal usaha ke koperasi.

Adapun cara mengatasi persoalan usaha yang lainnya adalah: sebanyak 9 orang UMKM menggunakan modal pribadi, 12 orang UMKM meminjam dana usaha dengan mengandalkan bantuan dana pinjaman dari Bank Mekar, 3 orang UMKM mengalihkan usaha pada usaha berjualan online, dan terakhir 7 orang UMKM bahkan sampai menjual asetnya, berupa kebun dan hasil kebunnya untuk menambah dan mengembangkan modal usahanya.

3.3. Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

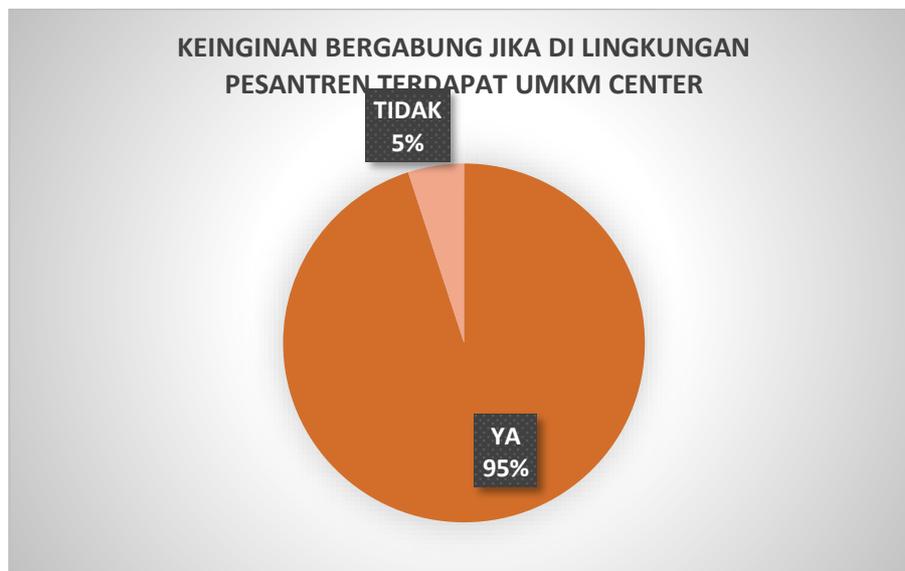
1. Kebutuhan terhadap Pendampingan Usaha/Program Inkubasi.



Grafik. 15 Kebutuhan Pendampingan Usaha

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat membutuhkan pendampingan usaha UMKM atau program inkubasi bisnis. Hal ini ditunjukkan oleh persentase 92%. Sisanya, 8% menyatakan tidak membutuhkan pendampingan usaha, sebab beberapa UMKM hanya memiliki usaha yang sifatnya tidak membutuhkan adanya pendampingan, seperti usaha jual beli batako atau genteng.

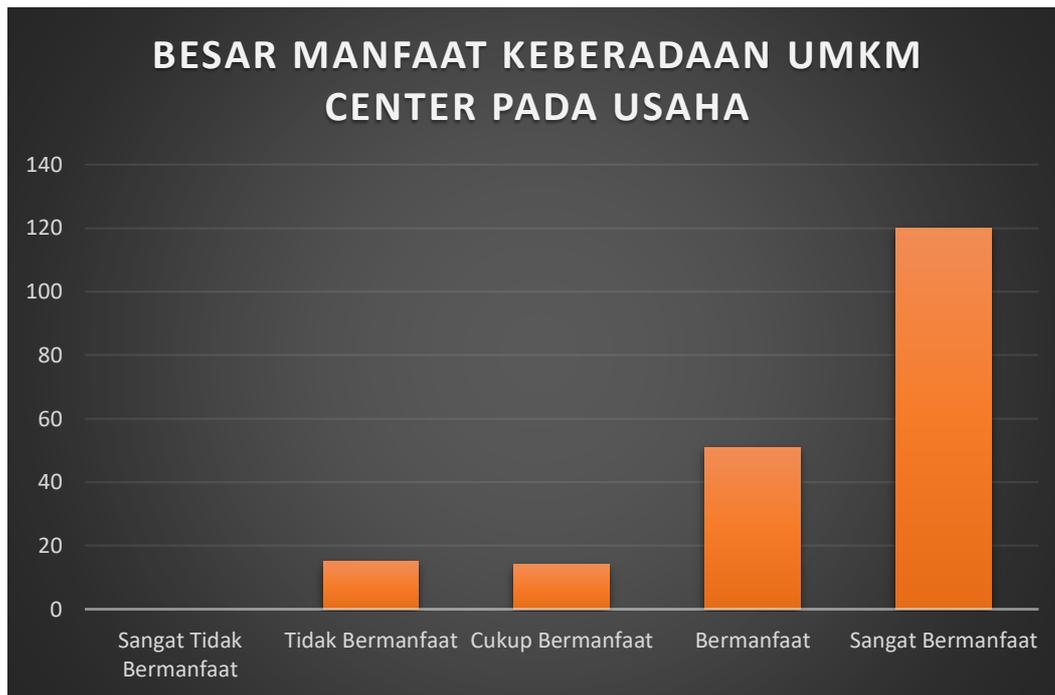
2. Ketertarikan untuk bergabung dengan UMKM Centre



Grafik 16. Ketertarikan untuk bergabung dengan UMKM Centre

95% UMKM sekitar pesantren sangat antusias untuk bergabung jika di lingkungan pesantren terdapat UMKM Centre. Sisanya hanya 5% yang tidak siap bergabung.

3. Manfaat UMKM Centre

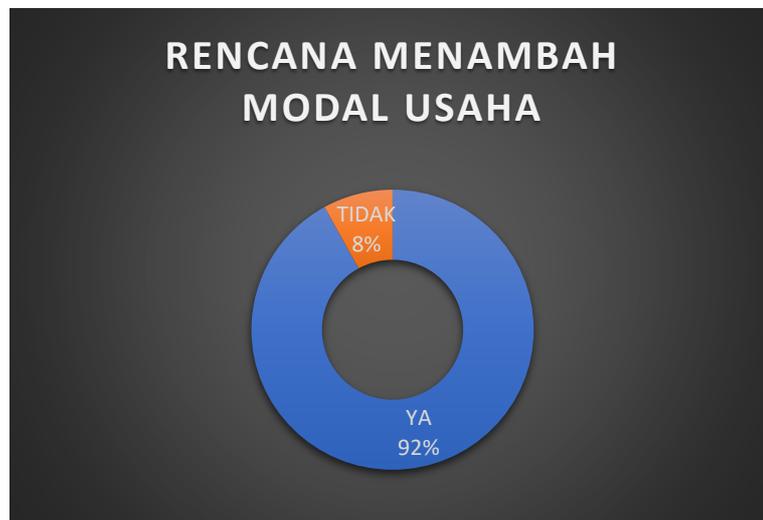


Grafik 17. Manfaat UMKM Centre

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan UMKM Centre tersebut akan sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat pada usaha yang mereka lakukan. Disusul dengan beberapa responden yang menyatakan bahwa keberadaan UMKM Centre akan bermanfaat bagi perkembangan usaha mereka. Hanya sebagian kecil yang menyatakan bahwa keberadaan UMKM Centre cukup bermanfaat, meskipun sangat sedikit responden yang menyatakan keberadaan UMKM Centre tidak begitu bermanfaat bagi perkembangan usaha mereka. Namun demikian, tidak ada responden yang menyatakan bahwa UMKM Centre sangat tidak bermanfaat bila diadakan di lingkungan pesantren.

3.4. Kebutuhan Pembiayaan

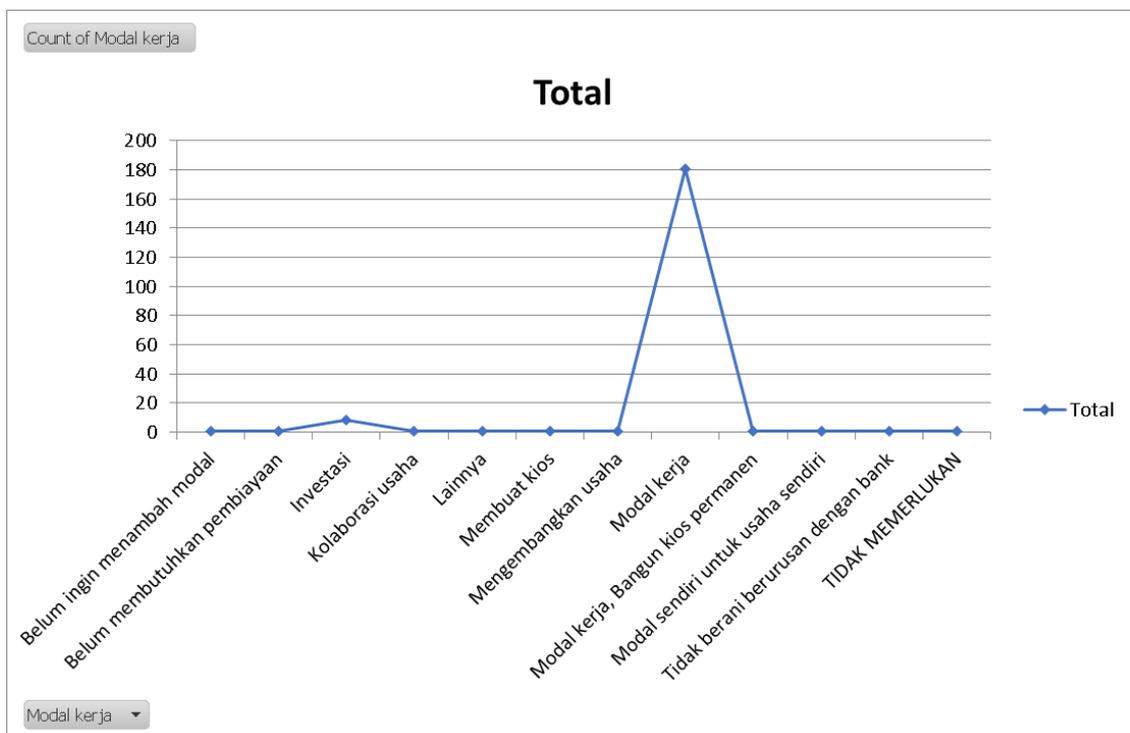
1. Rencana Menambah Modal Usaha



Grafik 18. Rencana Menambah Modal

UMKM sekitar pondok pesantren sebagian besar, yakni 92 % menyatakan sangat membutuhkan tambahan modal sehingga berencana menambah modal usaha demi kelancaran dan perkembangan usahanya. Sisanya 8% tidak berencana menambah modal usaha dikarenakan usaha yang mereka lakukan saat ini hanya sekedar hobi atau selingan kegiatan sehari-hari.

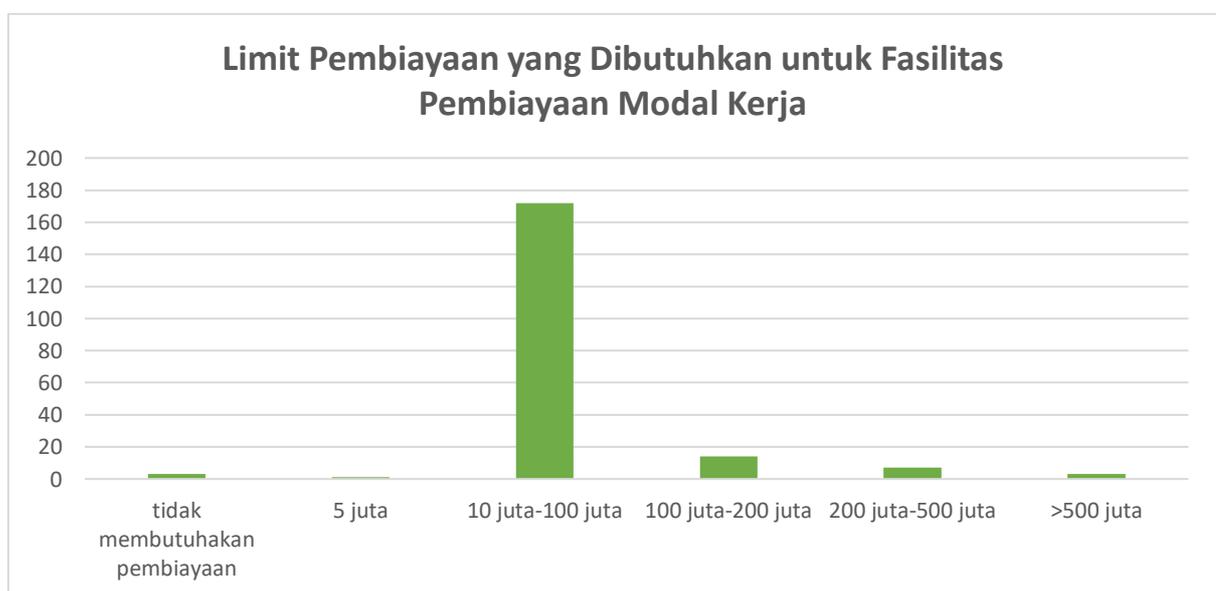
2. Jenis Pembiayaan Yang Dibutuhkan



Grafik 19. Jenis Pembiayaan yang Dibutuhkan UMKM

Dari grafik tentang jenis pembiayaan yang yang dibutuhkan oleh UMKM di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar, yakni sejumlah 181 responden (UMKM) menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan adalah pembiayaan modal kerja. 8 responden menyatakan jenis pembiayaan yang dibutuhkan adalah modal investasi. Sisanya, beberapa orang responden mengemukakan jenis pembiayaan yang dibutuhkan antara lain: 1 orang responden menginginkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, 1 UMKM menginginkan pembiayaan yang sanggup membantunya untuk membuat kios permanen, 1 UMKM bersedia mengajukan pembiayaan jika diberikan modal kerja sekaligus dibuatkan kios permanen, dan 1 UMKM berniat melakukan kolaborasi dengan Lembaga keuangan manapun, baik bank maupun non bank. Lebih dari itu, ada pula 1 responden (UMKM) yang bahkan tidak berani berurusan dengan bank, 1 UMKM belum ingin menambah modal, 1 UMKM belum membutuhkan pembiayaan dikarenakan masih mengandalkan bantuan keluarga dan kerabatnya. Ada juga 1 UMKM yang masih merasa mampu mengembangkan usahanya dengan menggunakan modal sendiri. Serta sisanya bahkan menyatakan sama sekali tidak memerlukan bantuan pembiayaan modal kerja dari siapapun.

3. Limit Modal Kerja yang dibutuhkan



Grafik 20. Limit Modal Kerja yang Dibutuhkan

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar responden membutuhkan dana yang relatif kecil yaitu sekitar 10 Juta hingga 100 Juta. Hal ini mungkin disebabkan karena usaha mereka yang merupakan usaha kecil menengah yang tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Namun uniknya, terdapat 14 sampel UMKM yang membutuhkan pembiayaan sebesar 100-200juta, 7 UMKM yang membutuhkan sebesar 200-500 juta, 2 UMKM yang membutuhkan lebih dari 500 juta, bahkan

terdapat satu UMKM yang membutuhkan tambahan modal sangat besar yaitu 500juta hingga 2 M.

4. Tujuan Tambahan Pembiayaan

Tabel 3
Tujuan Tambahan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan	Jumlah
Menambah Variasi Produk Usaha	68
Meningkatkan Jumlah Penjualan	81
Membayar Hutang/Cicilan	4
Menambah Variasi Produk Usaha Plus Meningkatkan Jumlah Penjualan	14
Lainnya	33
Total	200

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 68 responden UMKM menyatakan bahwa mereka memerlukan tambahan modal pembiayaan untuk menambah variasi produk usaha mereka. Namun demikian, 81 responden (UMKM) berkeinginan untuk meningkatkan jumlah penjualannya jika mendapatkan tambahan pembiayaan. Dan, setidaknya 14 UMKM mengaku jika mendapatkan tambahan modal pembiayaan akan digunakan untuk menambah variasi produk usahan sekaligus meningkatkan jumlah penjualannya. Akan tetapi, 4 orang responden (UMKM) berniat menjadikan tambahan pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk mencicil/membayar hutangnya. Sisanya, 33 responden (UMKM) memiliki beberapa alasan lain jika mendapatkan tambahan modal, antara lain membuka usaha baru, membuka cabang baru, menambah peralatan/perlengkapan usaha, dan lain-lain.

5. Lembaga Keuangan Sumber Modal

Tabel 4
Lembaga Keuangan untuk Mendapatkan Modal

Nama Lembaga Keuangan	Jumlah
Bank konvensional	4
- Bank konvensional, Bank Mekar	2
- Bank konvensional, Koperasi	2
- Bank konvensional, Koperasi Syariah	3
Bank Mekar	22
Bank Syariah	31
- Bank Syariah, Koperasi	1
- Bank Syariah, Koperasi Syariah	1
BPR	2
Koperasi	10

Koperasi Syariah	2
Pegadaian	6
Tidak menggunakan Lembaga keuangan formal	50
Belum menggunakan pembiayaan	2
Lain-lain	62
Grand Total	200

Berdasarkan table tentang Lembaga keuangan yang digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah UMKM yang mendapatkan modal dengan cara mengajukan pinjaman ke bank konvensional berjumlah 4 UMKM. Ada pula 2 UMKM yang disamping mengajukan ke bank konvensional, juga mendapatkan modal usaha dengan meminjam dana di Bank Mekar/Bank Jongkok sekaligus. Demikian juga, 2 UMKM mendapatkan pinjaman bantuan modal usaha dari bank konvensional juga meminjam dana di kperasi (konvensional), ada pula 3 UMKM yang mengajukan pinjaman ke bank konvensional tetapi juga mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah.

Hal yang mengejutkan adalah, terdapat 22 UMKM yang menjad responden survey ini menyatakan bahwa mereka mendapatkan modal usaha hanya dari pinjaman ke bank Mekar/Bank Jongkok yang sifatnya tanggung renteng.

Selanjutnya, ada 31 UMKM yang mendapatkan pembiayaan bantuan modal usaha dari bank Syariah. Ada pula 2 UMKM yang disamping mendapatkan pembiayaan usaha dari bank Syariah juga meminjam di koperasi dan koperasi Syariah.

Di BPR ada 2 UMKM yang mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha. Sementara di koperasi Syariah saja, terdapat 10 UMKM yang mendapatkan pinjaman dana usaha. 2 UMKM hanya mendapatkan bantuan dari koperasi Syariah an sich. 6 UMKM mengajukan pembiayaan di pegadaian, dan hanya 2 UMKM yang diwawancarai mengaku belum mendapatkan bantuan usaha meski telah mengajukan ke bank dan Lembaga keuangan lainnya. Uniknya, ada 55 UMKM yang mengaku mendapatkan modal usaha tidak melalui Lembaga keuangan formal bank maupun Lembaga keuangan lainnya, melainkan dengan modal sendiri dan meminta bantua keluarga atau kerabat. Terakhir, 62 UMKM mendapatkan bantuan modal usaha dari bermacam-macam sumber, antara lain memutar usahanya yang lain seperti jual-beli online, menjual asset berupa tanah/sawah dan pekarangan, dan lain-lain.

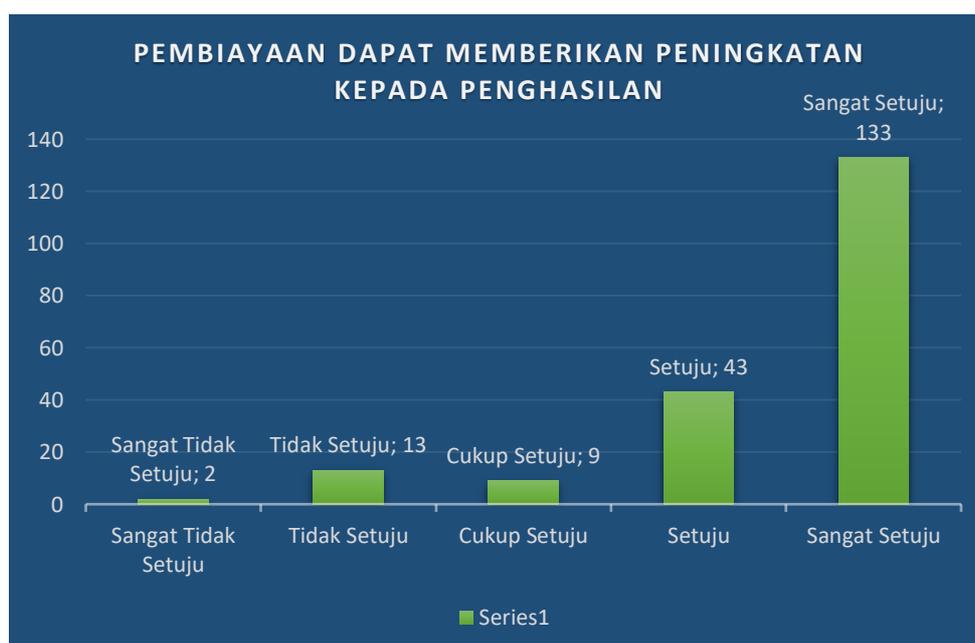
6. Ketertarikan untuk mengajukan Pembiayaan Syariah



Grafik 21. Ketertarikan untuk mengajukan Pembiayaan

Sebanyak 95% UMKM yang menjadi responden menjawab bahwa mereka tertarik untuk mengajukan pembiayaan ke bank Syariah jika ada di lingkungan dekat mereka. Namun demikian, ada 5% yang menjawab tidak tertarik. Ada beberapa syarat yang disampaikan oleh sebagian besar responden untuk menggunakan pembiayaan Syariah, antara lain: petugas bank, jika bias, datang ke lingkungan rumah (pesantren) terdekat, biaya di bank Syariah tidak lebih mahal, persyaratan yang lebih sedikit dan ramah untuk UMKM dan pedagang kecil seperti mereka. Sisanya, beberapa responden juga tertarik mengajukan pembiayaan berbasis Syariah jika akad yang dipakai berdasarkan Syariah, mengutamakan keadilan, mudah pula untuk membayar zakat/infak/shadaqah.

7. Manfaat Tambahan Pembiayaan bagi Penghasilan



Grafik. 22 Manfaat Tambahan Pembiayaan Syariah bagi Penghasilan

Bagi sebagian besar responden, yakni sejumlah 133 UMKM yang menyatakan ketertarikannya mengajukan pembiayaan Syariah, tentu saja dengan berbagai alasan dan syarat yang diajukan sebagai penjelasan sebelumnya, pembiayaan yang akan mereka dapatkan akan sangat bermanfaat bagi peningkatan hasil usaha mereka. Sisanya 43 responden menyatakan setuju, dan 9 orang menyatakan cukup setuju. Namun demikian, ada 13 responden yang menyatakan bahwa pembiayaan yang akan mereka dapatkan tidak akan begitu bermanfaat bagi perkembangan hasil usaha mereka, bahkan ada 2 responden yang menyatakan sangat tidak setuju yang berarti pembiayaan yang akan didapatkan tidak akan bermanfaat bagi hasil usaha mereka.

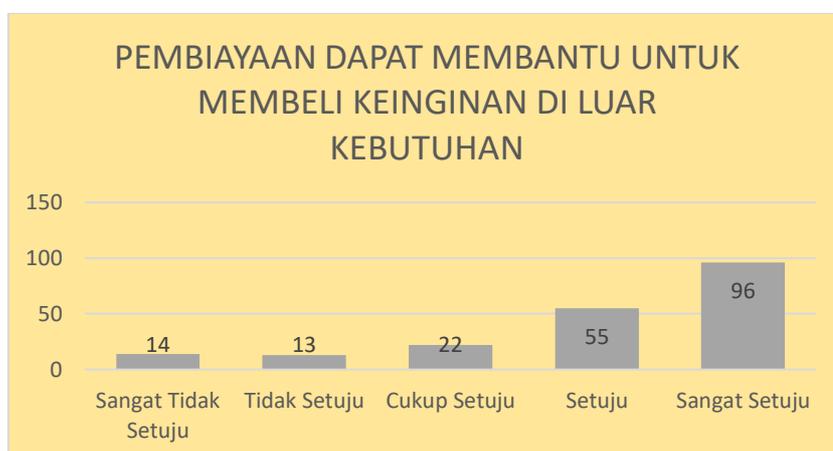
8. Manfaat Pembiayaan Syariah bagi Biaya Pendidikan Anak



Grafik 23. Manfaat Pembiayaan Syariah bagi Biaya Pendidikan Anak

Dari tabel di atas sangat jelas terlihat bahwa 113 responden menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan yang didapatkan akan sangat membantu bagi biaya Pendidikan anak. 54 responden menyatakan setuju, 16 responden menyatakan cukup setuju, 10 orang menyatakan tidak setuju, dan bahkan ada 7 responden yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa pembiayaan Syariah akan sangat membantu bagi Pendidikan anak.

9. Manfaat Pembiayaan Syariah di luar kebutuhan



Grafik 24. Manfaat pembiayaan di luar Kebutuhan

96 responden menyatakan sangat setuju apabila pembiayaan yang didapatkan akan sangat membantu untuk membeli keinginan di luar kebutuhan. Sisanya, 55 orang menyatakan setuju, 22 orang menyatakan cukup setuju, 13 orang menyatakan tidak setuju dan 14 responden menyatakan bahwa pembiayaan yang akan didapatkan tidak dapat membantu untuk membeli keinginan di luar kebutuhan.

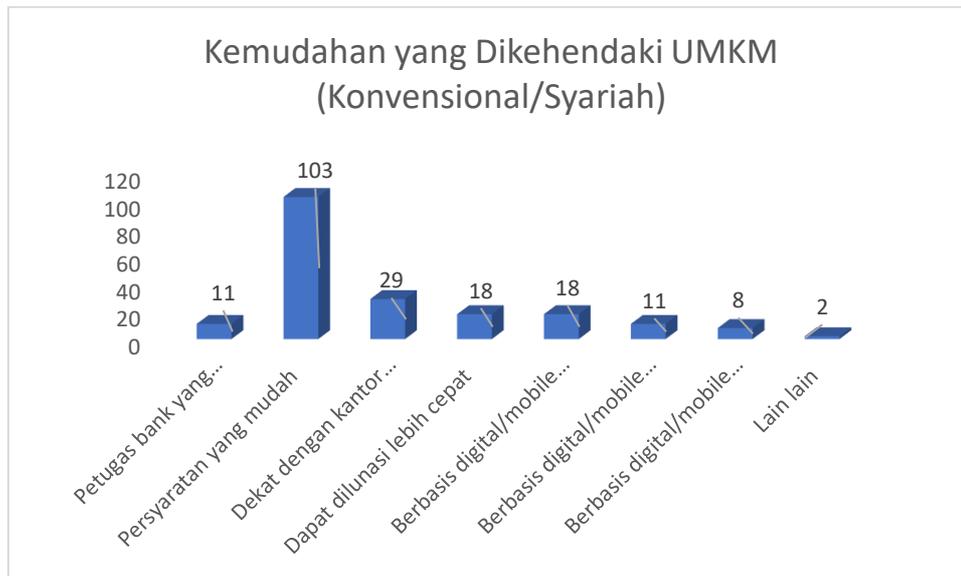
10. Manfaat Pembiayaan Syariah bagi Pemerataan Kesejahteraan Lingkungan



Grafik 25. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerataan Kesejahteraan

Bagi 119 responden, sangat setuju bahwa pembiayaan yang didapatkan akan sangat membantu pemerataan kesejahteraan lingkungan sekitar mereka. Sisanya, 51 responden menyatakan setuju, 19 UMKM menyatakan cukup setuju, 9 orang menyatakan tidak setuju dan terakhir 2 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa pembiayaan yang didapatkan akan sangat membantu pemerataan kesejahteraan lingkungan sekitar mereka.

11. Kemudahan Pembiayaan Yang Dikehendaki UMKM (Konvensional/Syariah)

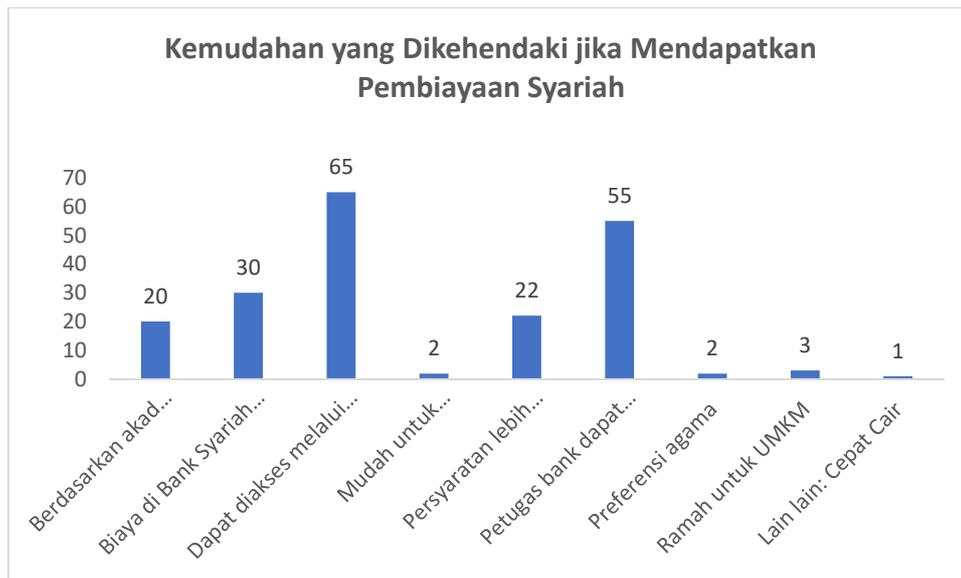


Grafik 26

Kemudahan Pembiayaan Yang Dikehendaki UMKM (Konvensional/Syariah)

Dari grafik di atas menjelaskan kepada kita, bahwa kemudahan yang paling dikehendaki oleh UMKM jika mendapatkan pembiayaan/pinjaman adalah persyaratan yang mudah. Hal ini dikarenakan banyak UMKM yang memang terkendala pada aspek persyaratan jika harus mengajukan pinjaman pembiayaan ke bank atau Lembaga keuangan konvensional atau Syariah. Oleh karena itu alasan persyaratan yang mudah ini menjadi pilihan utama yang diajukan oleh mereka. Hanya 29 UMKM yang mengatakan bahwa syarat dekat dengan kantor terdekat sebagai kemudahan yang dikehendaki oleh mereka. Demikian pula halnya kemudahan berupa dapat dilunasi dengan cepat dipilih oleh 18 responden. Jumlah yang sama, yakni 18 UMKM menyatakan kemudahan yang dikehendaki dalam pembiayaan atau pinjaman adalah berbasis digital/mobile banking. 11 UMKM menghendaki kemudahan berbasis digital plus dekat dengan kantor cabang/jaringan. Selain itu, ada 8 UMKM yang menghendaki selain berbasis digital/mobile banking, juga sekaligus harus dengan persyaratan yang mudah. 11 UMKM lainnya menghendaki petugas bank sendiri yang datang ke pesantren terdekat atau ke tempat usaha mereka. Dan, hanya 2 UMKM yang memiliki kehendak lain.

12. Kemudahan Pembiayaan Syariah yang Dikehendaki UMKM



Grafik 27
Kemudahan Pembiayaan Syariah Yang Dikehendaki UMKM

Khusus untuk kemudahan yang dikehendaki UMKM jika mendapatkan pembiayaan Syariah, maka dari grafik di atas terbaca jelas bahwa 65 UMKM menginginkan akses pembiayaan yang adapat diakses atau berbasis digital/mobile banking. 55 UMKM menghendaki petugas bank sendiri yang datang ke lingkungan rumah atau pesantren terdekat. 30 UMKM menghendaki persyaratan biaya di bank Syariah tidak lebih mahal dari bank konvensional. 22 UMKM menginginkan persyaratan di bank Syariah yang lebih sedikit. 20 UMKM menghendaki pembiayaan berdasarkan akad Syariah. 3 orang UMKM menghendaki kemudahan berupa bank Syariah harus ramah UMKM, 2 UMKM menginginkan persyaratan pembiayaan yang mudah untuk dilunasi dan 2 UMKM lainnya menginginkan preferensi agama harus dikedepankan. Sisanya, hanya ada 1 UMKM yang menghendaki kemudahan berupa pembiayaan yang cepat cair.

3.5. Pengetahuan Tentang Bank Syariah

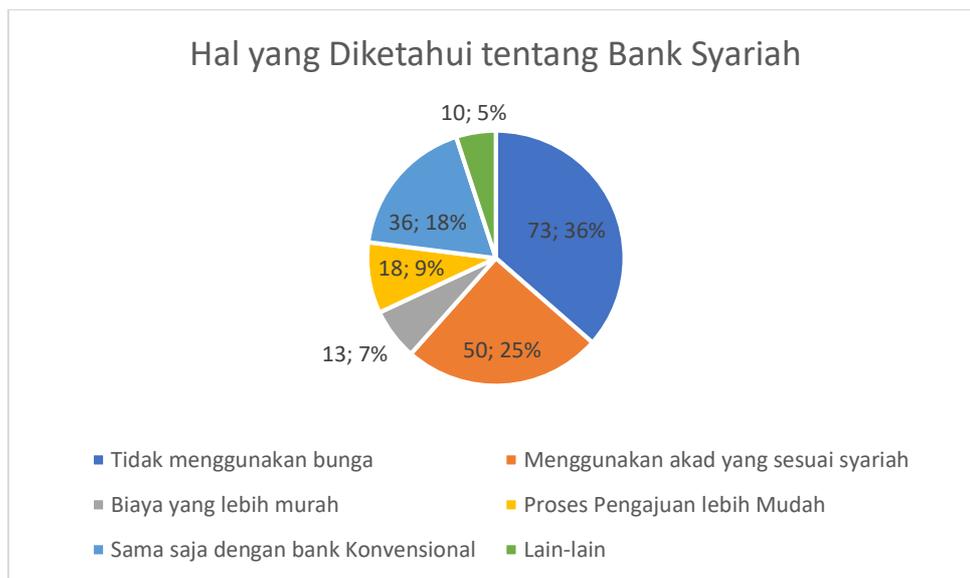
1. Pengetahuan Responden tentang Bank Syariah



Grafik 28. Pengetahuan tentang Bank Syariah

119 responden menyatakan sangat mengetahui bank Syariah, dimana bank Syariah adalah bank yang tidak menerapkan system bunga sebagai basis usahanya, sebab semua transaksi yang digunakan sudah disesuaikan dengan akad-akad yang sesuai Syariah dan sangat berbeda dengan pola manajemen bank konvensional. Selanjutnya, 51 orang menyatakan mengetahui bahwa bank Syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal bunga saja, dimana sebagai penggantinya, bank Syariah menerapkan system bagi hasil dan pola jual beli yang dibenarkan syara'. Sisanya, 19 responden cukup mengetahui keberadaan bank Syariah hanya dari berita, cerita atau pamphlet dan brosur, dan 9 responden bahkan tidak mengetahui keberadaan bank Syariah, dan terakhir terdapat 2 responden yang sama sekali sangat tidak mengetahui apa itu bank Syariah.

2. Hal yang Diketahui tentang Bank Syariah



Grafik 29. Hal yang Diketahui tentang Bank Syariah

Dengan memperhatikan tabel tentang hal-hal yang diketahui responden tentang bank Syariah di atas, maka dapat diketahui bahwa posisi pertama adalah sebanyak 73 responden (36%) menjawab bahwa bank Syariah adalah bank yang mekanisme operasionalnya tidak menggunakan bunga. Hal yang diketahui tentang bank Syariah kedua terbanyak adalah bank Syariah merupakan bank yang menggunakan akad-akad yang sesuai dengan aturan Syariah dalam kegiatannya. Responden yang menjawab pilihan ini berjumlah 50 responden atau sekitar 25%. Namun demikian, jawaban ketiga terbanyak tentang pengetahuan responden terkait bank Syariah justru menyatakan bahwa bank Syariah adalah sama saja, atau tidak berbeda dengan bank konvensional. Sebanyak 36 orang responden atau sekitar 18% ada di kategori responden yang menyatakan bahwa bank Syariah sama saja dengan bank konvensional. Selanjutnya, sebanyak 18 responden (9%) menyatakan bahwa di bank Syariah proses pengajuan (pembiayaan) lebih mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kredit di bank konvensional.

Sisanya, sebanyak 13 orang responden (7%) menyatakan bahwa bank Syariah adalah bank yang menerapkan biaya yang lebih murah bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika mengajukan pinjaman kredit ke bank konvensional. Sedangkan sisanya, 10 orang responden memiliki pengetahuan yang bermacam-macam tentang bank Syariah, antara lain ada yang menganggap bank Syariah adalah bank khusus orang muslim, bank bagi hasil, ada pula yang mengatakan bahwa bank Syariah belum familiar dan hanya pernah diketahui sekilas saja melalui televisi dan media cetak. Sisanya adalah tidak tahu mengenai keberadaan bank syariah.

manajemen operasionalnya tidak menggunakan bunga disebabkan karena akad-akad yang digunakan telah sesuai dengan aturan Syariah, plus dengan 5 orang responden (2,5%) menyatakan alasan tambahan yakni di bank Syariah juga bisa sekaligus membayar zakat/infak/sedekah/wakaf dengan mudah. Ada juga 4 responden (2%) menyatakan bahwa bank Syariah tidak menerapkan system bunga juga bisa sekaligus membayar zakat/infak/sedekah/wakaf dengan mudah. 7 orang responden (3,5%) menjawab bahwa di bank Syariah biaya pengajuan pembiayaan lebih murah, sebanyak 2 orang responden (1%) lainnya menyatakan di bank Syariah biaya pengajuan pembiayaan lebih murah disamping menggunakan akad-akad yang sesuai Syariah. Sama jumlahnya dengan 2 orang responden (1%) memberi jawaban lain-lain. Sisanya, masing-masing 1 orang responden (0,5%) ada yang menjawab bahwa bank Syariah adalah bank dengan sistem bagi hasil, banknya orang muslim *an-sich*, bahkan ada 3 orang yang mengatakan tidak tahu tentang bank Syariah, 1 orang menyatakan belum familiar, dan lain-lain yang jumlahnya masing-masing 1 orang responden.

3. Hal yang Terlintas tentang Bank Syariah



Grafik 30. Hal yang terlintas tentang Bank Syariah

Jawaban terbanyak responden, yakni sebanyak 81 orang mengatakan bahwa bank Syariah adalah bank yang amanah. 31 orang responden menyatakan bank Syariah adalah bank yang mengedepankan asas keadilan. Jumlah ini, yakni 31 responden, menyatakan justru tidak mengetahui secara jelas apa itu bank Syariah. Sebanyak 29 responden menyatakan bahwa bank Syariah merupakan bank yang transparan dalam usahanya. Ada juga responden sebanyak 5 orang menjawab bahwa bank Syariah adalah bank tanpa bunga, dan jumlahnya sama dengan jumlah responden yang menyatakan bahwa bank Syariah sama saja dengan bank konvensional, yakni 5 orang responden. Sebanyak 3 orang responden menyatakan bank Syariah adalah bank yang amanah sekaligus adil. 3 orang responden menyatakan bank Syariah adalah bank yang amanah sekaligus transparan. 3 orang responden

menyatakan pendapatnya bahwa bank Syariah adalah bank yang islami. 2 orang responden menyatakan bank Syariah adalah bank yang transparan dan adil, amanah dan transparan menurut 2 orang responden, bank yang syar'i menurut 2 orang responden. Sisanya alasan lain-lain seperti bank islami sekaligus bank tanpa bunga, bank islami sekaligus lebih transparan, dan bank yang mengurangi instrument riba dalam usahanya, masing-masing 1 orang responden.

3.6. Masukan Umum



Grafik 31
Kesediaan Menginformasikan pembiayaan berbasis pesantren

Terkait dengan kesediaan menginformasikan pembiayaan berbasis pesantren, maka dari hasil olah data diperoleh fakta lapangan bahwa 194 orang atau 97% responden menyatakan bersedia dan akan menginformasikan kepada teman/kerabat/tetangga jika ada pembiayaan berbasis pesantren. Dan hanya 6 orang yang tidak bersedia menginformasikannya.

Rata-rata sebagian besar responden memberikan pesan khusus untuk kebutuhan pembiayaan dari bank Syariah, itupun jika betul-betul ada di lingkungan pesantren terdekat, dimana pembiayaan bank Syariah seharusnya syarat yang diajukan lebih mudah dan tidak ribet bagi pelaku usaha mikro seperti mereka. Selain itu, untuk membedakan pembiayaan berbasis bank Syariah, maka jangan sampai ada istilah “mengelabui” nasabah dengan istilah yang bermacam-macam namun intinya justru lebih menyulitkan dan membebani daripada bunga di bank konvensional. Jika pun mereka di tengah jalan mengalami masalah dan tidak mampu membayar pembiayaan kepada bank Syariah, maka jangan sampai

terjadi penyitaan terhadap asset seperti tanah dan rumah atau bahkan usaha mereka. Lebih jauh, bank Syariah seharusnya lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan pendampingan jika nasabah menemui kesulitan pembayaran. Dengan begitu, nasabah akan senantiasa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak bank Syariah jika mengalami masalah, dan memperbolehkan nasabah mengajukan perpanjangan waktu, kelonggaran bahkan kesempatan untuk mengusahakan pembayaran pembiayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebab, pada dasarnya, tidak ada nasabah yang menginginkan masalah jika mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, bank Syariah perlu mengedepankan asas keadilan dan ramah terhadap pelaku UMKM seperti mereka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data lapangan sebagaimana sudah dipaparkan di atas, berikut beberapa kesimpulan dari survei ini, yaitu:

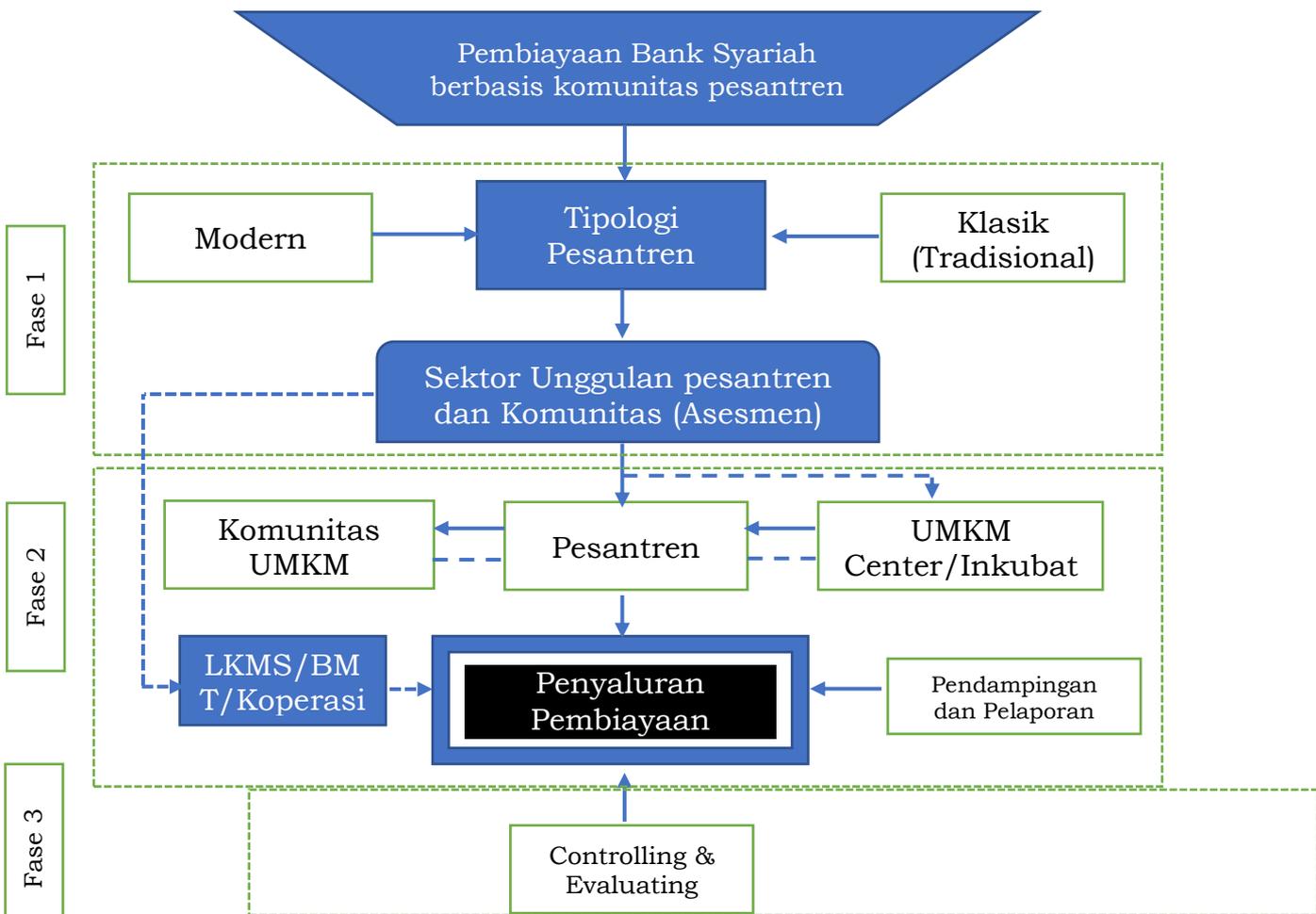
1. Rata-rata UMKM sekitar pondok pesantren (lokasi survei) di Lombok mengenal bank Syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat Lombok mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada beberapa responden yang disurvei merupakan nasabah bank Syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Rata-rata UMKM sekitar pesantren yang menjadi responden menjadi nasabah bank konvensional, bahkan menjadi nasabah Bank Mekar yang merupakan lembaga keuangan lokal yang bersifat non formal yang lebih mereka kenal dengan sebutan “bank Jongkok”.
3. Sebagian besar UMKM yang disurvei lebih banyak bergerak pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor unggulan yang ditawarkan pun adalah pada sektor ini.
4. Rata-rata UMKM di sekitar pesantren yang disurvei membutuhkan pendampingan usaha dan sebenarnya berniat mengajukan pembiayaan ke bank syariah, terutama jika kantornya dekat dengan pesantren atau tempat terdekat. Hanya saja, UMKM masih merasa ragu bahkan cenderung takut karena menganggap bank syariah akan sama saja dengan bank konvensional yang memakai bunga. Selain itu, UMKM juga merasa takut berhubungan dengan bank, termasuk bank Syariah karena khawatir terjadi adanya penyitaan asset jika tidak mampu membayar cicilan.
5. Rata-rata masukan dari UMKM yang disurvei meminta syarat pembiayaan yang mudah dan tidak ribet disamping lokasinya yang sebaiknya dekat dengan lingkungan pesantren.
6. Sebagian besar responden mengusulkan bank syariah perlu melakukan sosialisasi dan segera membuka kantor cabang terdekat supaya masyarakat lebih mengenal dan mendapatkan manfaat dari bank syariah.
7. Pondok pesantren yang berkarakter modern dan cenderung eksklusif (tertutup) serta bersifat mandiri dalam mengelola keuangan dan manajemen usahanya, cenderung tidak berdampak pada peningkatan usaha UMKM sekitar pondok pesantren. Sebaliknya, pondok pesantren yang berkarakteristik klasik dan terbuka memiliki dampak yang sangat signifikan bagi peningkatan usaha UMKM sekitar pesantren.
8. Meskipun temuan data di lapangan menunjukkan fakta seperti pada no. 7 di atas, rata-rata mereka sangat berharap UMKM Center di lingkungan pesantren tetap ada untuk memudahkan akses pembiayaan, pendampingan dan pengawasan yang lebih mudah dan cepat.
9. Persepsi UMKM terhadap pembiayaan syariah akan sangat mampu membantu mereka pada peningkatan pendapatan mereka, mengurangi biaya Pendidikan, pemerataan kesejahteraan dan membantu pembelian di luar kebutuhan pokok pada level yang tinggi.

10. Diperlukan program khusus untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah bekerja sama dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan *stakeholders* lainnya untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi mengenai bank syariah ataupun Lembaga keuangan syariah lain.

4.2. Rekomendasi Strategi

Setelah mendapatkan paparan komprehensif dari uraian hasil dan temuan, maka rekomendasi strategi untuk penyeluran pembiayaan syariah berbasis komunitas pesantren adalah sebagai berikut:

Setelah mendapatkan paparan komprehensif dari uraian hasil dan temuan, maka rekomendasi strategi untuk penyeluran pembiayaan syariah berbasis komunitas pesantren adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Strategi Pembiayaan Syariah Berbasis Komunitas Pesantren

Pembiayaan syariah berbasis komunitas dapat dilaksanakan dalam 3 fase besar dimulai dengan

- a. Fase pengenalan dan pengelompokan sektor usaha dan usaha unggulan dari setiap pesantren sesuai dengan tipologi pesantren. Tahapan ini menjadi tahapan awal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui seluk beluk, karakter dan usaha unggulan bagi komunitas pesantren. Setelah itu diperlukan asesmen awal untuk mengetahui legibilitas dari UMKM, seperti karakter, pengembangan dan arahan karakteristik UMKM setiap pesantren.
- b. Fase pembentukan komunitas dan UMKM Centre yang melekat kepada pesantren sebagaimana tipologi yang telah diases pada fase awal. Komunitas UMKM ini akan melekat dengan pesantren, sehingga secara langsung mendapatkan pengajaran dan sentuhan spiritual dari pihak pesantren. Disisi lain, UMKM Center diinisiasi oleh LKS atau bank syariah yang berafiliasi dengan pesantren. UMKM Centre ini berlaku sekaligus incubator bisnis untuk brain storming, pendampingan, strategi marketing, packaging dan juga produk inovasi dari UMKM binaan masing-masing pesantren. Setelah terbentuk dengan cukup kuat, kurang lebih 3-6 bulan berjalan, dilanjutkan pada tahap eksekusi yaitu penyaluran pembiayaan dengan didampingi dan implementasi pelaporan akuntansi sederhana yang dilakukan oleh UMKM. Disisi lain, bank syariah melakukan kerjasama dengan LKMS baik berbentuk bank wakaf mikro, Baitul maal wat tamwil atau koperasi syariah atau bentuk organisasi resmi dari warga seperti Majelis taklim yang terdapat arisan dan kegiatan ekonomi lainnya.
- c. Fase akhir adalah tahapan controlling dan evaluating. Controlling ini secara kelembagaan dapat dilakukan oleh bank syariah, LKS partisipan (Kerjasama), bahkan oleh pesantren sendiri. Pengawasan berupa penggunaan dana pembiayaan, aspek produksi, dan juga penjualan. Sedangkan evaluasi dapat dilaksanakan dengan sistem bulanan dengan disisipkan pengajian pekanan rutin.

Dari tiga hal ini, pembiayaan syariah berbasis komunitas pesantren harapannya dapat dilakukan dengan baik. Diperlukan *pilot project* di beberapa titik pesantren untuk percontohan yang telah memiliki produk unggulan dan majelis taklim pekanan, sehingga implementasi akan lebih mudah dan berjalan dengan baik. Harapan

dari model ini dapat terjadi sebuah bounding kepada pesantren dan UMKM centre yang diinisiasi atas Kerjasama bersama. Hal akhir, koordinasi dapat dilakukan dengan pemerintah setempat yakni representasi dari pemerintah jawa barat dengan program one pesantren one product.

BIBLIOGRAFI

- Deprtemen Agama, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditpekapontren, 2003.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1984.
- Fadjar, A. Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan 1999.
- Fahrurrozi, "Budaya Pesantren di Pulau Seribu Masjid, Lombok", dalam *Jurnal Karsa* Vol. 20 No. 2 Desember 2012.
- Harapandi, "Pemikiran Pembaharuan TGKH. Mu-hammad Zaenuddin Abdul Majid", *Tesis*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Litbang, *Deskripsi Aliran Kepercayaan Wetu Telu di Pulau Lombok*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah Perkembangan*, Jakarta: Logos, 1999.
- Nasution, Harun, *Falsafah Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nu'man, Abd Hayyi dan Sahafari Ays'ari, *Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial, dan Dakwah*, Lombok: Toko Buku Kita, 1988.
- Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Pot-ret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Purbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.
- Salam, Solichin, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya* Jakarta: Kuning Mas, 1992.
- Wahid, Abdurrahman, "Pondok Pesantren Masa Depan", ed. Marzuki Wahid et.al, *Masa Depan Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Profil Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Pemrakarsa, 1992.